LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2021 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2021 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan:

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran Perangkat Daerah (PD), review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, telaah terhadap Renja Tahun 2021 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja PD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
3. Substansi Renja PD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan PD terhadap Renstra PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
5. Program/kegiatan dalam Renja dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Kota Malang; dan
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam RENJA Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kota Malang Tahun 2021 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas.

Sedangkan, prinsip teknis yang dipergunakan dalam penyusunan Renja PD adalah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 ini mengacu pada :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah:
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan Penyelenggaran Pemerintah Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; dan
17. Peraturan Walikota Malang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
    1. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan maksud untuk :

* + 1. Memberikan gambaran mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan terhadap pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan
    2. Sebagai pedoman perencanaan satu tahun guna membangunan kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis PD (Renstra PD) Kota Malang Tahun 2018-2023.
    3. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci, terarah, efektif, efisien, terpadu, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan**.**

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2021, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018-2023, dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran indikatif;
2. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam satu tahun yang tersusun dalam rencana;
3. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama satu tahun;
4. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengambil langkah-langkah atau kebijakan mengenai tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya;
5. Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun sebelumnya;
6. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
   1. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2021 ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun dan Capaian Renstra
  2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

* 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Perencanaan untuk tahun 2021 harus didasari hasil evaluasi capaian renja periode sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi dan identifikasi tersebut digunakan untuk merumuskan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil dalam rangka pencapaian target pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 35.999.241.370,- untuk melaksanakan 9 program yang dijabarkan dalam 76 kegiatan.

Hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

* + 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan dengan realisasi sebesar 18,73% namun ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target pada kegiatan yaitu:
   * + 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 3 dokumen dari target sebesar 6 dokumen sehingga baru tercapai 50%.

* + - 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 dokumen dari target sebesar 2 dokumen sehingga baru tercapai 0%.

* + - 1. Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 1 dokumen dari target sebesar 2 dokumen sehingga baru tercapai 50%.

* + - 1. Kegiatan Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 3 dokumen dari target sebesar 4 dokumen sehingga baru tercapai 75%.

* + - 1. Kegiatan Penyusunan/Reviu Renstra

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 dokumen dari target sebesar 1 dokumen sehingga baru tercapai 0%.

* + - 1. Kegiatan Penyusunan Renja/RKT

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 dokumen dari target sebesar 1 dokumen sehingga baru tercapai 0%.

* + - 1. Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 1 dokumen dari target sebesar 2 dokumen sehingga baru tercapai 50%.

* + - 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 m2 dari target sebesar 600 m2 sehingga baru tercapai 0%.

* + - 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 40 unit dari target sebesar 63 unit sehingga baru tercapai 63,49%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 2.305 surat dari target sebesar 3.800 surat sehingga baru tercapai 60,66%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 6 bulan dari target sebesar 12 bulan sehingga baru tercapai 50%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 222.358 m2 dari target sebesar 1.182.384 m2 sehingga baru tercapai 18,81%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 5.280 buah dari target sebesar 10.558 buah sehingga baru tercapai 50,01%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 12 jenis dari target sebesar 15 jenis sehingga baru tercapai 80%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 1 jenis dari target sebesar 8 jenis sehingga baru tercapai 12,50%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 540 eks dari target sebesar 1.080 eks sehingga baru tercapai 50%.

* + - 1. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 3.754 kotak dari target sebesar 14.432 kotak sehingga baru tercapai 26,01%.

* + - 1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 16 kali dari target sebesar 40 kali sehingga baru tercapai 40%.

* + - 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 4 jenis dari target sebesar 14 jenis sehingga baru tercapai 28,57%.

* + - 1. Kegiatan Pengadaan BBM dan Pelumas

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 44.522 liter dari target sebesar 83.479 liter sehingga baru tercapai 53,33%.

* + - 1. Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 8 peserta diklat dari target sebesar 99 peserta diklat sehingga baru tercapai 8,08%.

1. Program Pengembangan Usaha Mikro dengan target sebesar 40,79% dan terealisasi sebesar 1,96% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Klinik Usaha Mikro

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 427 UM dari target sebesar 1.100 UM sehingga baru tercapai 38,82%.

2. Kegiatan Penyusunan Database Usaha Mikro

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 aplikasi dari target sebesar 1 aplikasi sehingga baru tercapai 0%.

3. Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 1 UM dari target sebesar 8 UM sehingga baru tercapai 12,50%.

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro dengan target sebesar 48,60% dan terealisasi sebesar 0% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Calon Wirausaha Baru)

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 orang dari target sebesar 420 orang sehingga baru tercapai 0%.

1. Program Pembinaan Koperasi dengan target sebesar 79,85% dan terealisasi sebesar 4,82% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Fasilitasi Klinik Koperasi

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 135 orang dari target sebesar 200 orang sehingga baru tercapai 67,50%.

2. Kegiatan Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 koperasi dari target sebesar 90 koperasi sehingga baru tercapai 0%.

3. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Perubahan dan Pembubaran Koperasi

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 6 koperasi dari target sebesar 15 koperasi sehingga baru tercapai 40%.

4. Kegiatan Penilaian Kesehatan bagi USP/KSP

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 89 koperasi dari target sebesar 135 koperasi sehingga baru tercapai 65,93%.

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 70 orang dari target sebesar 245 orang sehingga baru tercapai 28,57%.

1. Program Bina Perdagangan dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 21% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 22 kali dari target sebesar 90 kali sehingga baru tercapai 24,44%.

2. Kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 kali dari target sebesar 1 kali sehingga baru tercapai 0%.

3. Kegiatan Pemantauan Ketersediaan Atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 kali dari target sebesar 2 kali sehingga baru tercapai 0%.

4. Kegiatan Promosi Perdagangan Produk Kota Malang

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 2 UKM dari target sebesar 6 UKM sehingga baru tercapai 33,33%.

5. Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Sarana Usaha/Distribusi Perdagangan

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 toko modern dari target sebesar 50 toko modern sehingga baru tercapai 0%.

6. Kegiatan E-Commerce bagi UKM Kota Malang

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 UKM dari target sebesar 125 UKM sehingga baru tercapai 0%.

7. Kegiatan Operasional UPT. Metrologi

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 6 bulan dari target sebesar 12 bulan sehingga baru tercapai 50%.

8. Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 8.081 UTTP dari target sebesar 10.000 UTTP sehingga baru tercapai 80,81%.

9. Kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Pemantauan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 181 hari dari target sebesar 365 hari sehingga baru tercapai 45,59%.

10. Kegiatan Pengembangan dan Pemutakhiran Data UKM

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 400 UKM dari target sebesar 600 UKM sehingga baru tercapai 66,67%.

1. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 0% ada kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 kali dari target sebesar 8 kali sehingga baru tercapai 0%.

1. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar dengan target sebesar 2% dan terealisasi sebesar 1% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Penataan dan Penyuluhan PKL

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 2.069 PKL dari target sebesar 2.612 PKL sehingga baru tercapai 79,21%.

2. Kegiatan Penataan dan Ketertiban Pasar

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 156 hari dari target sebesar 312 hari sehingga baru tercapai 50%.

3. Kegiatan Penampungan Pedagang Untuk Revitalisasi Pasar

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 150 pedagang dari target sebesar 453 pedagang sehingga baru tercapai 33,11%.

4. Kegiatan Revitalisasi Pasar

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 pasar dari target sebesar 2 pasar sehingga baru tercapai 0%.

5. Kegiatan Operasional UPT. Pasar

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 7 jenis dari target sebesar 12 jenis sehingga baru tercapai 58,33%.

6. Kegiatan Revitalisasi Pasar Kedung Kandang

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 pasar dari target sebesar 1 pasar sehingga baru tercapai 0%.

1. Program Pengembangan Industri dengan target sebesar 2% dan terealisasi sebesar 0,23% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan Bagi Industri

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 perjanjian kerjasama dari target sebesar 3 perjanjian kerjasama sehingga baru tercapai 0%.

2. Kegiatan Operasional dan Aktifasi MCC

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 pelaku industri dari target sebesar 50 pelaku industri sehingga baru tercapai 0%.

3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan IKM

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 1 IKM kreatif dari target sebesar 4 IKM kreatif sehingga baru tercapai 25%.

4. Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 50 IKM kreatif dari target sebesar 130 IKM kreatif sehingga baru tercapai 38,46%.

5. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Industri

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 aplikasi dari target sebesar 1aplikasi sehingga baru tercapai 0%.

9. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan IKM

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 IKM kreatif dari target sebesar 60 IKM kreatif sehingga baru tercapai 0%.

11. Kegiatan Fasilitasi dan Standarisasi Industri dan KI (Banprov)

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 IKM kreatif dari target sebesar 12 IKM kreatif sehingga baru tercapai 0%.

12. Kegiatan Penyelenggaraan Event Industri Kreatif (Banprov)

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 IKM kreatif dari target sebesar 300 IKM kreatif sehingga baru tercapai 0%.

13. Kegiatan Workshop Teknis (Banprov)

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 IKM kreatif dari target sebesar 180 IKM kreatif sehingga baru tercapai 0%.

1. Program Pembinaan Industri dengan target sebesar 30% dan terealisasi sebesar 0% ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target yaitu:

1. Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikasi/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 0 mesin dari target sebesar 40 mesin sehingga baru tercapai 0%.

2. Kegiatan Pemetaan Industri Hasil Tembakau

Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 400 dokumen dari target sebesar 0 dokumen sehingga baru tercapai 0%.

* + 1. Faktor-Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target KinerjaProgram/ Kegiatan

Adapun kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran disebabkan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin sehingga target yang ingin dicapai masih belum dapat terpenuhi.

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tidak tercapainya target kegiatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Tidak tercapainya target kegiatan laporan penyusunan laporan keuangan disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Desember.

3. Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat

Tidak tercapainya target kegiatan pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada semester dua.

4. Kegiatan Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA

Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada semester dua.

5. Kegiatan Penyusunan/Reviu Renstra

Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan/reviu Renstra disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan II dan Tribulan III.

6. Kegiatan Penyusunan Renja/RKT

Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan Renja/RKT disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan I sampai dengan Tribulan III.

7. Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan profil perangkat daerah disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan III.

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tidak tercapainya target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tidak tercapainya target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional disebabkan karena perbaikan kendaraan dinas disesuaikan dengan kondisi kerusakan kendaraan.

10. Kegiatan Jasa Surat Menyurat

Tidak tercapainya target kegiatan jasa surat menyurat disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan jasa komunikasi disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

13. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan alat tulis kantor disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

14. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

15. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

16. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

17. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan makanan dan minuman disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

18. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tidak tercapainya target kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah disebabkan karena ada anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas rapat-rapat koordinasi ke luar daerah.

19. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor

Tidak tercapainya target kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan.

20. Kegiatan Pengadaan BBM dan Pelumas

Tidak tercapainya target kegiatan pengadaan BBM dan Pelumas karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

21. Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tidak tercapainya target kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur karena ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas bersama dalam satu ruangan.

1. Program Pengembangan Usaha Mikro

1. Kegiatan Klinik Usaha Mikro

Tidak tercapainya target kegiatan klinik usaha mikro karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

2. Kegiatan Penyusunan Database Usaha Mikro

Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan database usaha mikro karena masih dalam proses pelaksanaan.

3. Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang

Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro Kota Malang karena masih dalam proses pelaksanaan.

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro

1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Calon Wirausaha Baru)

Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) karena kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III.

1. Program Pembinaan Koperasi

1. Kegiatan Fasilitasi Klinik Koperasi

Tidak tercapainya target kegiatan fasilitasi klinik koperasi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

2. Kegiatan Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi

Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan September.

3. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Perubahan dan Pembubaran Koperasi

Tidak tercapainya target kegiatan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

4. Kegiatan Penilaian Kesehatan bagi USP/KSP

Tidak tercapainya target kegiatan penilaian kesehatan bagi USP/KSP karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)

Tidak tercapainya target kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah (PK2UKM) karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

1. Program Bina Perdagangan

1. Kegiatan Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Tidak tercapainya target kegiatan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

2. Kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Tidak tercapainya target kegiatan operasi pasar dan pasar murah karena kegiatan ini biasanya dilaksanakan saat menjelang hari raya idul fitri, hari raya idul adha, dan hari raya natal dan tahun baru.

3. Kegiatan Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Tidak tercapainya target kegiatan pemantauan ketersediaan atau distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

4. Kegiatan Promosi Perdagangan Produk Kota Malang

Tidak tercapainya target kegiatan promosi perdagangan produk Kota Malang karena pada saat ini masih ada pandemi virus covid-19 sehingga kegiatan promosi perdagangan produk Kota Malang tidak dapat dilaksanakan.

5. Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Sarana Usaha/Distribusi Perdagangan

Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan karena kegiatan ini masih dalam proses pelaksanaan.

6. Kegiatan E-Commerce bagi UKM Kota Malang

Tidak tercapainya target kegiatan e-commerce bagi UKM Kota Malang karena kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang berakhir pada bulan Desember.

7. Kegiatan Operasional UPT. Metrologi

Tidak tercapainya target kegiatan operasional UPT. Metrologi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

8. Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Tidak tercapainya target kegiatan pelayanan tera dan tera ulang karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

9. Kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Pemantauan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya

Tidak tercapainya target kegiatan pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

10. Kegiatan Pengembangan dan Pemutakhiran Data UKM

Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan dan pemutakhiran data UKM karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan berakhir pada bulan September.

1. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

1. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran

Tidak tercapainya target kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III.

1. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar

1. Kegiatan Penataan dan Penyuluhan PKL

Tidak tercapainya target kegiatan penataan dan penyuluhan PKL karena ada beberapa PKL yang diundang tetapi mereka tidak hadir.

2. Kegiatan Penataan Ketertiban Pasar

Tidak tercapainya target kegiatan penataan ketertiban pasar karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

3. Kegiatan Penampungan Pedagang Untuk Revitalisasi Pasar

Tidak tercapainya target kegiatan penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar karena masih dalam proses pelaksanaan.

4. Kegiatan Revitalisasi Pasar

Tidak tercapainya target kegiatan revitalisasi pasar karena masih dalam proses pelaksanaan.

5. Kegiatan Operasional UPT. Pasar

Tidak tercapainya target kegiatan operasional UPT. Pasar karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

7. Kegiatan Revitalisasi Pasar Kedungkandang

Tidak tercapainya target kegiatan revitalisasi Pasar Kedungkandang karena masih dalam proses pelaksanaan.

1. Program Pengembangan Industri

1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan Bagi Industri

Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan kemitraan bagi industri karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

2. Kegiatan Operasional dan Aktifasi MCC

Tidak tercapainya target kegiatan operasional dan aktifasi MCC karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan IKM

Tidak tercapainya target kegiatan penguatan kelembagaan IKM karena kegiatan anggaran dialihkan untuk covid-19 sehingga IKM yang mendapatkan legalitas kelembagaan IKM hanya 1 IKM kreatif.

4. Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI

Tidak tercapainya target kegiatan fasilitasi standarisasi industry dan KI karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

5. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Industri

Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan sistem informasi data industri karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

6. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan IKM

Tidak tercapainya target kegiatan pemantauan dan pengawasan IKM karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

7. Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI (Banprov)

Tidak tercapainya target kegiatan fasilitasi standarisasi industri dan KI (Banprov) karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Event Industri Kreatif (Banprov)

Tidak tercapainya target kegiatan event industri kreatif (Banprov) karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

9. Kegiatan Workshop Teknis Industri (Banprov)

Tidak tercapainya target kegiatan workshop teknis industri (Banprov) karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

1. Program Pembinaan Industri

1. Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikasi/ Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Tidak tercapainya target kegiatan pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikasi/kode registrasi mesin pelinting rokok karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

2. Kegiatan Pemetaan Industri Hasil Tembakau

Tidak tercapainya target kegiatan pemetaan industri hasil tembakau karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

* + 1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Sarana Prasarana Kantor

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 8 jenis pemeliharaan perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor dari target pada renstra sebesar 8 jenis pemeliharaan perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor.

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Khusus

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 80 stel pakaian kerja lapangan dari target pada renstra sebesar 80 stel pakaian kerja lapangan.

1. Program Bina Perdagangan
2. Kegiatan Sosialisasi Konsumen Cerdas

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 275 peserta sosialisasi dari target pada renstra sebesar 275 peserta sosialisasi.

1. Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha dan Kemitraan Usaha

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 100 UKM yang bermitra dengan toko modern dari target pada renstra sebesar 100 UKM yang bermitra dengan toko.

1. Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha Perdagangan

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 19 UKM yang mengurus legalitas usaha dari target pada renstra sebesar 19 UKM yang mengurus legalitas usaha.

1. Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Gudang

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 4 kali pemantauan dan pengawasan gudang dari target pada renstra sebesar 4 kali pemantauan dan pengawasan gudang.

1. Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 4 kali pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol dari target pada renstra sebesar 4 kali pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol.

1. Kegiatan Bimbingan teknis Ekspor bagi UKM Kota Malang

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 80 UKM yang mengikuti bimtek dari target pada renstra sebesar 80 UKM yang mengikuti bimtek.

1. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar
2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PKL

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 25 unit papan himbauan PKL dari target pada renstra sebesar 25 unit papan himbauan PKL.

1. Kegiatan Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 9 pasar yang terpelihara dari target pada renstra sebesar sebesar 9 pasar yang terpelihara.

1. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat Sesuai Standar Nasional Indonesia

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 150 peserta pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia dari target pada renstra sebesar 150 peserta pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia.

1. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pasar

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 20 unit pengadaan gerobak sampah dari target pada renstra sebesar 20 unit pengadaan gerobak sampah.

1. Program Pengembangan Industri
2. Kegiatan Pencitraan Produk Industri Kreatif

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 jenis produk yang dibranding dari target pada renstra sebesar 1 jenis produk yang dibranding.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Event Industri Kreatif

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 1 pelaku industri kreatif yang mengikuti event dari target pada renstra sebesar 1 pelaku industri kreatif yang mengikuti event.

1. Kegiatan Pengembangan dan Pendampingan Industri Hijau

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 5 IKM yang menerapkan sistem industri hijau dari target pada renstra sebesar sebesar 5 IKM yang menerapkan sistem industri hijau.

1. Kegiatan Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 50 IKM yang mendapatkan pendampingan mutu dari target pada renstra sebesar sebesar 50 IKM yang mendapatkan pendampingan mutu.

1. Kegiatan Penyuluhan Bagi IKM

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 25 IKM yang mendapatkan penyuluhan dari target pada renstra sebesar sebesar 25 IKM yang mendapatkan penyuluhan.

1. Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Industri

Kegiatan ini sudah tercapai 100% dengan terealisasi sebesar 10 WUB yang tumbuh dari target pada renstra sebesar sebesar 10 WUB yang tumbuh.

* + 1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2020, realisasi program/kegiatan belum ada yang melebihi target.

* + 1. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

5.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari program tersebut diatas adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

* + - 1. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja disebabkan karena kegiatan masih akan dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV.
      2. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan laporan keuangan disebabkan karena kegiatan masih akan dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Desember.
      3. Tidak tercapainya target kegiatan pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada semester I dan semester II.
      4. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada semester I dan semester II.
      5. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada semester I dan semester II.
      6. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan Renja/RKT disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan I sampai dengan Tribulan III.
      7. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan profil perangkat daerah disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Tribulan III.
      8. Tidak tercapainya target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II.
      9. Tidak tercapainya target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional disebabkan karena perbaikan kendaraan dinas disesuaikan dengan kondisi kerusakan kendaraan.
      10. Tidak tercapainya target kegiatan jasa surat menyurat disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      11. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan jasa komunikasi disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      12. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      13. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan alat tulis kantor disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      14. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      15. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan instalasi listrik di kantor.
      16. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      17. Tidak tercapainya target kegiatan penyediaan makanan dan minuman disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan desember.
      18. Tidak tercapainya target kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah disebabkan karena adanya anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas rapat-rapat koordinasi ke luar daerah.
      19. Tidak tercapainya target kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor disebabkan karena masih dalam proses pelaksanaan.
      20. Tidak tercapainya target kegiatan pengadaan BBM dan pelumas disebabkan karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.
      21. Tidak tercapainya target kegiatan penigkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur disebabkan karena ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas bersama dalam satu ruangan lebih dari 30 orang.

1. Program Pengembangan Usaha Mikro

1. Tidak tercapainya target kegiatan klinik usaha mikro karena merupakan kegiatan rutin yang akan berakhir di bulan Desember.

2. Tidak tercapainya target kegiatan penyusunan database usaha mikro karena masih dalam proses pelaksanaan.

3. Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro Kota Malang karena masih dalam proses pelaksanaan.

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro

1. Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) karena kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III.

1. Program Pembinaan Koperasi

1. Tidak tercapainya target kegiatan fasilitasi klinik koperasi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

2. Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan kepatuhan KSP/USP koperasi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan September.

3. Tidak tercapainya target kegiatan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

4. Tidak tercapainya target kegiatan penilaian kesehatan bagi USP/KSP karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

5. Tidak tercapainya target kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah (PK2UKM) karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

1. Program Bina Perdagangan

1. Tidak tercapainya target kegiatan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

2. Tidak tercapainya target kegiatan operasi pasar dan pasar murah karena kegiatan ini biasanya dilaksanakan saat menjelang hari raya idul fitri, hari raya idul adha, dan hari raya natal dan tahun baru.

3. Tidak tercapainya target kegiatan pemantauan ketersediaan atau distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

4. Tidak tercapainya target kegiatan promosi perdagangan produk Kota Malang karena pada saat ini masih ada pandemi virus covid-19 sehingga kegiatan promosi perdagangan produk Kota Malang tidak dapat dilaksanakan.

5. Tidak tercapainya target kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan karena kegiatan ini masih dalam proses pelaksanaan.

6. Tidak tercapainya target kegiatan e-commerce bagi UKM Kota Malang karena kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang berakhir pada bulan Desember.

7. Tidak tercapainya target kegiatan operasional UPT. Metrologi karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

8. Tidak tercapainya target kegiatan pelayanan tera dan tera ulang karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

9. Tidak tercapainya target kegiatan pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

10. Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan dan pemutakhiran data UKM karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dan berakhir pada bulan September.

1. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

1. Tidak tercapainya target kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III.

1. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar

1. Tidak tercapainya target kegiatan penataan dan penyuluhan PKL karena ada beberapa PKL yang diundang tetapi mereka tidak hadir.

2. Tidak tercapainya target kegiatan penataan ketertiban pasar karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

3. Tidak tercapainya target kegiatan penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar karena masih dalam proses pelaksanaan.

4. Tidak tercapainya target kegiatan revitalisasi pasar karena masih dalam proses pelaksanaan.

5. Tidak tercapainya target kegiatan operasional UPT. Pasar karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

7. Tidak tercapainya target kegiatan revitalisasi Pasar Kedungkandang karena masih dalam proses pelaksanaan.

1. Program Pengembangan Industri

1. Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan kemitraan bagi industri karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

2. Tidak tercapainya target kegiatan operasional dan aktifasi MCC karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

3. Tidak tercapainya target kegiatan penguatan kelembagaan IKM karena kegiatan anggaran dialihkan untuk covid-19 sehingga IKM yang mendapatkan legalitas kelembagaan IKM hanya 1 IKM kreatif.

4. Tidak tercapainya target kegiatan fasilitasi standarisasi industry dan KI karena kegiatan merupakan kegiatan rutin dan berakhir di bulan Desember.

5. Tidak tercapainya target kegiatan pengembangan sistem informasi data industri karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

6. Tidak tercapainya target kegiatan pemantauan dan pengawasan IKM karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

7. Tidak tercapainya target kegiatan fasilitasi standarisasi industri dan KI (Banprov) karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

8. Tidak tercapainya target kegiatan event industri kreatif (Banprov) karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

9. Tidak tercapainya target kegiatan workshop teknis industri (Banprov) karena kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.

1. Program Pembinaan Industri

1. Tidak tercapainya target kegiatan pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikasi/kode registrasi mesin pelinting rokok karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

2. Tidak tercapainya target kegiatan pemetaan industri hasil tembakau karena kegiatan ini dilaksanakan pada Semester II.

* + 1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi Sumber daya Manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

* + 1. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan, maka pada tahun 2021 perlu dilakukan:

1. Melakukan review/telaah ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas;
2. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur program yang tercantum pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
3. Merencanakan kegiatan sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru;
4. Merencanakan kegiatan untuk mendukung kebijakan industri nasional meliputi pembangunan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan industri;
5. Menyesuaikan rencana kebutuhan anggaran sekretariat terkait dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang mendukung capaian program; dan
7. Mengadakan pendekatan dan penyesuain anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan, secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan berupa *review* kembali terhadap rencana jadwal pelaksanaan kegiatan sekaligus diupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai jadwal, agar sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terkonsentrasi pada bulan-bulan terakhir. Hal ini tentunya memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat diantaranya dari sarana dan prasarana, SDM pelaksana serta regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Semester I tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut.

TABEL TC – 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2020

KOTA MALANG

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

| Kode Rekening | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2019 | Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 | | | Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun 2020) | Tingkatan Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 |  | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 003 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen | 1.500 surat | 2.000 surat | 2.200 surat | 110% | 2.000 surat | 5.700 surat | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 004 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 36 bulan | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 007 | Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil survey kepuasaan | 2 dokumen | 441.000 m2 | 441.000 m2 | 441.000 m2 | 100% | 665.150 m2 | 1.546.150 m2 | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 010 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | 56 jenis ATK | 53 jenis ATK | 53 jenis ATK | 100% | 51 jenis ATK | 160 jenis ATK | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 012 | Penyusunan/Reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | 14 jenis | 14 jenis | 14 jenis | 100% | 16 jenis | 44 jenis | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 013 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/ RKT | 1 dokumen | 9 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 100% | 8 jenis | 25 jenis | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 015 | Penyusunan Profil Perangkat Daerah | Jumlahdokumen profil perangkat daerah | 2 dokumen | 3 jenis surat kabar | 3 jenis surat kabar | 3 jenis surat kabar | 100% | 3 jenis surat kabar | 9 jenis surat kabar | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 018 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 600 m2 | 2.514 kotak | 2.352 kotak | 2.304 kotak | 97.96% | 2.376 kotak | 7.194 kotak | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 020 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 63 unit | 78 kali | 80 kali | 91 kali | 114% | 40 kali | 209 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 022 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Sarana Prasarana Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 8 jenis | 2 kali | 1 kali | 1 kali | 100% | 2 kali | 5 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 031 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 3.800 surat | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 jenis perarsipan surat | 1 jenis perarsipan surat | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 032 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 037 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 1.182.384 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 038 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 10.558 buah |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 039 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 040 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 8 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 042 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1.080 exp |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 043 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 14.432 kotak |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 044 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 40 kali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 061 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sarana dan Prasarana Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 14 jenis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 063 | Pengadaan Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus | Jumlah pakaian dinas | 80 stel |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 066 | Pengadaan BBM dan Pelumas | Jumlah/volume BBM dan pelumas | 83.479 liter |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 07 | 072 | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti pelatihan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dll | 99 peserta diklat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 17 |  | Program Pengembangan Usaha Mikro | Persentase pertumbuhan unit usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 40,79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 17 | 001 | Klinik Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | 1.100 UM | 0 unit | 6 unit | 6 unit | 100% | 15 unit | 21 unit | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 17 | 004 | Penyusunan Database Usaha Mikro | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | 1 aplikasi | 1.160 m2 | 1.648 m2 | 1.648 m2 | 100% | 200 m2 | 3.008 m2 | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 17 | 008 | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang | Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 8 UM | 24 unit | 36 unit | 36 unit | 100% | 32 unit | 92 unit | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 18 |  | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro | Persentase WUB Mikro yang tumbuh | 48,60% | 10 jenis perbaikan | 5 jenis perbaikan | 4 jenis perbaikan | 80% | 8 jenis perbaikan | 22 jenis perbaikan | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 18 | 001 | Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Calon Wirausaha Baru) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 420 orang | 120 buah | 310 buah | 310 buah | 100% | 190 buah | 620 buah | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 19 |  | Program Pembinaan Koperasi | Persentase koperasi aktif | 79,85% | 95.428 liter BBM dan 525 botol minyak pelumas | 98.100 liter BBM dan 511 botol minyak pelumas | 90.730 liter BBM dan 511 botol minyak pelumas | 92.49% | 77.100 liter BBM dan 480 botol minyak pelumas | 263.258 liter BBM dan 1.515botol minyak pelumas | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 19 | 006 | Fasilitasi Klinik Koperasi | Jumlah pengurus/ pengawas/pengelola/ anggota koperasi yang melakukan konsultasi | 330 orang | 24.73% | 26.67% | 25,64% | 96.14% | 50% | 55,37% | 111% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 19 | 010 | Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi yang patuh | 90 koperasi | 105 peserta | 50 peserta | 50 peserta | 100% | 75 peserta | 230 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 19 | 011 | Fasilitasi Pembentukan Perubahan dan Pembubaran Koperasi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pembentukkan, perubahan dan pembubarannya | 15 koperasi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 19 | 014 | Penilaian Kesehatan Bagi USP/KSP | Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya dan jumlah unit koperasi yang mengikuti sosialisasi E-Penkes | 135 koperasi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 19 | 015 | Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PK2UKM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 |  | Program Bina Perdagangan | Persentase peningkatan UTTP bertanda tera sah | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 001 | Sosialisasi Konsumen Cerdas | Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas | 275 peserta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 002 | Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media cetak, televisi dan radio | 90 kali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 003 | Operasi Pasar dan Pasar Murah | Jumlah pengadaan pasar murah | 1 kali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 004 | Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya | Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2 kali | 85.94% | 100% | 90,57% | 90.57% | 100% | 276.51% | 276.51% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 005 | Fasilitasi Temu Usaha dan Kemitraan Usaha | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 100 UKM | 1 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 006 | Promosi Perdagangan Produk Kota Malang | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 6 UKM | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 6 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 007 | Sosialisasi Legalitas Usaha Perdagangan | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 19 UKM | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 6 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 008 | Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Gudang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | 4 kali | 1 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 009 | Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Sarana Usaha/Distribusi Perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | 50 toko modern | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 010 | Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Minuman Beralkohol | Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | 4 kali | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 011 | Bimbingan Teknis Ekspor Bagi UKM Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 80 UKM | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 012 | E-Commerce bagi UKM Kota Malang | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 125 UKM | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 013 | Operasional UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 12 bulan | 0% | 0% | 0 | 0% | 250 pedagang | 250 pedagang | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 014 | Pelayanan Tera dan Tera Ulang | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 10.000 UTTP | 90 kali | 90 kali | 90 kali | 100% | 45 kali | 225 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 017 | Pemutakhiran Data Sistem Informasi Pemantauan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 hari | 1 kali | 3 kali | 3 kali | 100% | 4 kali | 8 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 25 | 018 | Pengembangan dan Pemutakhiran Data UKM | Jumlah UKM yang di data | 600 UKM | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 komoditi | 4 komoditi | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 26 |  | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 100% | 300 peserta | 200 peserta | 200 peserta | 100% | 150 peserta | 650 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 26 | 001 | Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjual Eceran | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 8 kali | 22 kali | 22 kali | 22 kali | 100% | 22 kali | 66 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 |  | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 2% | 0 | 150 peserta | 150 peserta | 100% | 65 peserta | 215 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 001 | Penataan dan Penyuluhan PKL | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | 2.612 PKL | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 002 | Pengawasan dan Pengendalian PKL | Jumlah papan himbauan PKL | 25 unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 unit | 37 unit | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 003 | Penataan Ketertiban Pasar | Jumlah pelaksanaan operasi ketertiban pasar | 312 hari | 73.87% | 92.86% | 74,92% | 80.68% | 100% | 248.99% | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 004 | Rehabilitasi Ringan/ Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat | Jumlah pasar yang terpelihara | 9 pasar | 6 pasar | 17 pasar | 17 pasar | 100% | 6 pasar | 29 pasar | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 005 | Penampungan Pedagang untuk Revitalisasi Pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 453 pedagang | 147 hari | 140 hari | 140 hari | 100% | 251 hari | 538 hari | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 006 | Revitalisasi Pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 2 pasar | 44 kali | 44 kali | 44 kali | 100% | 44 kali | 132 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 008 | Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat Sesuai Standar Nasional Indonesia | Jumlah pedagang pasar rakyat yang mengikuti pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI | 150 peserta | 80 peserta | 340 peserta | 340 peserta | 100% | 65 peserta | 485 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 009 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pasar | Jumlah pengadaan gerobak sampah | 20 unit | 20 unit gerobak sampah dan 35 unit gerobak sampah yang terpelihara | 20 unit gerobak sampah, 40 unit tempat sampah, dan 20 unit gerobak sampah yang terpelihara | 20 unit gerobak sampah, 40 unit tempat sampah, dan 20 unit gerobak sampah yang terpelihara | 100% | 16 unit gerobak sampah | 56 unit gerobak sampah, 40 unit tempat sampah, dan 55 unit gerobak sampah yang terpelihara | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 010 | Operasional UPT. Pasar | Jumlah pasar yang terjaga kebersihan dan keamanannya | 12 pasar | 320 peserta | 421 peserta | 421 peserta | 100% | 247 pedagang | 988 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 27 | 012 | Revitalisasi Pasar Kedungkandang | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 1 pasar | 0 | 4 pasar | 4 pasar | 100% | 1 pasar | 5 pasar | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 |  | Program Pengembangan Industri | Persentase peningkatan jumlah IKM | 2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 160 peserta | 160 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 001 | Pencitraan Produk Industri Kreatif | Jumlah jenis produk yang di branding | 1 jenis | 200 peserta | 90 peserta | 90 peserta | 100% | 110 peserta | 400 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 002 | Pengembangan Kemitraan bagi Industri | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 perjanjiankerjasama | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 kali | 3 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 003 | Penyelenggaraan Event Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 1 pelaku industri | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 pasar | 1 pasar | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 006 | Operasional dan Aktifasi MCC | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 50 pelaku ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 pasar | 1 pasar | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 009 | Pengembangan dan Pendampingan Industri Hijau | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 5 IKM kreatif | 28% | 40% | 36.01% | 90.03% | 45% | 109.01% | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 010 | Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM kreatif | 26 kali | 8 kali | 10 kali | 80% | 6 kali | 42 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 014 | Penguatan Kelembagaan IKM | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 4 IKM kreatif | 16 kali | 6 kali | 6 kali | 100% | 8 kali | 30 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 015 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI | Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi | 130 IKM kreatif | 0 | 0 | 0 | 0% | 85 peserta | 85 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 016 | Pengembangan Sistem Informasi Data Industri | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 aplikasi | 291 data pedagang | 350 data pedagang | 335 data pedagang | 95.71% | 400 data pedagang | 1.025 data pedagang | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 017 | Penyuluhan Bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 25 IKM kreatif | 57 peserta | 50 peserta | 50 peserta | 100% | 35 peserta | 142 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 018 | Penumbuhan Wirausaha Baru Industri | Jumlah WUB | 10 WUB | 20 kali | 6 kali | 6 kali | 100% | 8 kali | 34 kali | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 019 | Pemantauan dan Pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 60 IKM kreatif | 80 peserta | 200 peserta | 200 peserta | 100% | 130 peserta | 410 peserta | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 021 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan KI (Banprov) | Jumlah IKM yang fasilitasi | 12 IKM | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 022 | Penyelenggaraan Event Industri Kreatif (Banprov) | Jumlah IKM yang mengikuti event kreatif | 300 IKM | 0 | 6 kali | 4 kali | 66.67% | 8 kali | 12 kali | 85.71% |
| 1 | 17 | 1.17 | 01 | 28 | 023 | Workshop Teknis Industri Kreatif (Banprov) | Jumlah IKM yang mengikuti workshop | 180 IKM | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.000 alat UTTP | 5.000 alat UTTP | 100% |
| 2 | 6 | 2.06 | 01 | 29 |  | Program Pembinaan Industri | Persentase IHT yang dibina | 30% | 0 | 24 jenis | 24 jenis | 100% | 20 jenis | 44 jenis | 100% |
| 2 | 6 | 2.06 | 01 | 29 | 001 | Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikasi/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok | Jumlah mesin pelinting yang diawasi | 40 mesin | 0 | 150 peserta | 150 peserta | 100% | 150 peserta | 300 peserta | 100% |
| 2 | 6 | 2.06 | 01 | 29 | 002 | Pemetaan Industri Hasil Tembakau | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dokumen | 14.341 UTTP | 17.117 UTTP | 17.117 UTTP | 100% | 13.400 UTTP | 44.858 UTTP | 100% |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, analisis kinerja pelayanan PD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama).

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan, IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Rangkuman tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagaimana pada Tabel T-C.30 di bawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel : TC - 30 | | | | | | | | | | | | |
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | |
| Kota Malang | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK (Indikator Kinerja Kunci) | Target Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
| Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Persentase Koperasi Sehat |  |  | 5,14% | 10,15% | 40,10% | 70,05% | 4,79% |  | 40,10% | 70,05% |  |
| 2. | Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil |  |  | 7,90% | 11,22% | 40,79% | 70,39% |  |  | 40,79% | 70,39% |  |
| 3. | Pertumbuhan Industri |  |  | 3,67 | 3,70 | 3,88 | 4,15 | 3,67 |  | 3,88 | 4,15 |  |
| 4. | Peresentase Pasar Halal |  |  | 0% | 0% | 8% | 11,54% | 0% |  | 8% | 11,54% |  |
| 5. | Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antar Waktu |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 2% | 2% |  |
| 6. | Nilai SAKIP |  |  | - | 80,50 | 80,67 | 80,90 |  |  | 80,67 | 80,90 |  |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2020

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sudah optimal namun tidaklah menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tentunya dalam melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat. Berikut ini adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

* + 1. Kualitas SDM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas;
    2. Belum Optimalnya Validasi data keragaan Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat dan Update;
    3. Belum sepenuhnya koperasi melaksanaan RAT;
    4. Kualitas Sumber Daya Koperasi belum memahami terhadap penilaian kesehatan, kepatuhan dan ketaatan peraturan perundang-undangan Koperasi masih terbatas;
    5. Masih rendahnya tingkat pendidikan ketrampilan kerja bagi usaha mikro sehingga masih memerlukan pendampingan dalam menjalankan usahanya;
    6. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor;
    7. Masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
    8. Kompetensi Aparatur kurang memadai dalam mengantisipasi isu;
    9. Belum dilakukannya kerjasama secara intensif dengan lembaga pendidikan bidang industri berbasis kompetensi (tidak *overlapping* dengan kewenangan provinsi);
    10. Minimnya pemahaman dan standarisasi industri serta perlindungan HKI yang belum optimal;
    11. Belum adanya lembaga sertifikasi produk dan penyediaan laboratorium untuk menguji standariasi produk industri;
    12. Sistem informasi perindustrian belum berjalan dengan optimal;
    13. Lemahnya validasi dan updating database perindustrian yang realtime yang mampu menggambarkan kondisi perindustrian terkini;
    14. Kurang memaksimalkan keterlibatan *stakeholder* (*Colaborative Governance*) terhadap industri kecil;
    15. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi IKM;
    16. Rendahnya sinergisitas riset pengembangan teknologi dengan  
        lembaga riset;
    17. Belum adanya penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
    18. Belum terbentuknya kawasan industri kreatif Kota Malang;
    19. Belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster;
    20. Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan;
    21. Potensi SDA dan SDM belum dioptimalkan untuk penguatan  
        komoditas unggulan;
    22. Masih lemahnya kualitas dan upaya menciptakan differensiasi dan diversivikasi produk industri kecil;
    23. Belum adanya pengelolaan yang baik kepada anggota paguyuban/ asosiasi masyarakat industri;
    24. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
    25. Pengembangan perdagangan dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
    26. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan;
    27. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM Kota Malang;
    28. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar dalam maupun luar negeri;
    29. Peningkatan penggunaan produk dalam daerah untuk mendorong pengembangan perdagangan lokal;
    30. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
    31. Peningkatan perlindungan konsumen;
    32. Peningkatan kemetrologian daerah;
    33. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha perdagangan;
    34. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perdagangan;
    35. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan;
    36. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
    37. Peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perdagangan; dan
    38. Optimalisasi pendapatan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Upaya Tindakan terhadap permasalahan:

* 1. Menekankan pada pembangunan sumber daya industri (SDM industri, pengembangan dan pemanfaatan SDA, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi), pengembangan sarana dan prasarana (perwilayahan industri seperti sentra industri dan penetapan kawasan khusus industri, standarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual/KI, serta pengelolaan sistem informasi industri), dan pemberdayaan induatri (pemberdayaan IKM, pemanfaatan keativitas dan inovasi, pengembangan industri hijau).

1. Masih diperlukan program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan persentase koperasi yang aktif sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai wujud ekonomi rakyat.
2. Mengingat peran Usaha Mikro yang besar dalam mendukung perekonomian daerah dan jumlah Usaha Mikro baru yang terus bertambah maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk membantu Usaha Mikro tersebut untuk ditingkatkan kualitasnya sehingga memiliki daya saing ditingkat yang lebih luas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 terdiri dari Rancangan awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal RKPD melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kota. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan serta adanya penyederhanaan beberapa program dan kegiatan.

Rancangan awal RKPD dibuat melalui perencanaan dari bawah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain SDM, dana, kebutuhan masyarakat, dan faktor lain yang terkait. Oleh sebab itu perencanaan dibuat berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang direncanakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil analisis kebutuhan. Program dan kegiatan dari rancangan awal RKPD kemudian disempurnakan baik dari besaran dananya, penyederhanaan program dan kegiatan serta adanya kegiatan tambahan yang memang harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai langkah tindak lanjut terhadap berbagai masukan pada saat Musrenbang dan Forum gabungan Perangkat Daerah serta penyesuaian rekening kegiatan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merencanakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program yang dijabarkan dalam 97 (sembilan puluh tujuh) kegiatan yaitu:

* + 1. Program Pelayanan Kesekretariatan meliputi 26 kegiatan;
    2. Program PengembanganUsaha Mikro meliputi 10 kegiatan;
    3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro meliputi 2 kegiatan;
    4. Program Pembinaan Koperasi meliputi 10 kegiatan;
    5. Program Bina Perdagangan meliputi 18 kegiatan;
    6. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal meliputi 1 kegiatan;
    7. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar meliputi 8 kegiatan;
    8. Program Pengembangan Industri meliputi 20 kegiatan; dan
    9. Program Pembinaan Industri meliputi 2 kegiatan.

Dinamika dan analisis yang dilakukan menyebabkan beberapa perubahan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja. Beberapa rasionalisasi program/kegiatan dilakukan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel : T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021

KOTA MALANG

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

| **NO** | **RANCANGAN AWAL RKPD** | | | | | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | | | | **CATATAN PENTING** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/ KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Belanja Langsung** |  |  |  | **39.617.224.000** | **Belanja Langsung** |  |  |  | **32.974.779.000** |  |
|  | **Urusan Wajib** |  |  |  | **3.832.952.400** | **Urusan Wajib** |  |  |  | **3.288.937.000** |  |
|  | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  | **3.832.952.400** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  | **3.288.937.000** |  |
| I | **Program Pembinaan Koperasi** |  | **Persentase koperasi aktif** | **87,10%** | **759.120.700** | **Program Pembinaan Koperasi** |  | **Persentase koperasi aktif** | **87,10%** | **762.420.000** |  |
|  | 1.   Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi | Koperasi binaan Dikopindang | Jumlah unit koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi | 17 koperasi | 35.370.000 | Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi | Koperasi binaan Dikopindang | Jumlah unit koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi | 17 koperasi | 38.669.300 |  |
|  | 2.   Bimtek pelaksanaan rapat anggota koperasi | Kota Malang | Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek | 75 orang | 53.635.000 | Bimtek pelaksanaan rapat anggota koperasi | Kota Malang | Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek | 75 orang | 53.635.000 |  |
|  | 3.   Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat | Kelurahan Pisang Candi | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian | 70 orang | 55.427.000 | Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat | Kelurahan Pisang Candi | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian | 70 orang | 55.427.000 |  |
|  | 4.   Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | Provinsi Jawa Timur | Jumlah pengurus koperasi/masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | 300 orang | 188.170.000 | Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | Provinsi Jawa Timur | Jumlah pengurus koperasi/masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | 300 orang | 188.170.000 |  |
|  | 5.   Peningkatan kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi |  | Jumlah koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | 31 sertifikat | 1.770.000 | Peningkatan kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi |  | Jumlah koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | 31 sertifikat | 1.770.000 |  |
|  | 6.   Bimtek manajemen koperasi | Kota Malang | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP | 78 koperasi | 92.350.000 | Bimtek manajemen koperasi | Kota Malang | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP | 78 koperasi | 92.350.000 |  |
|  | 7.   Fasilitasi peningkatan akses permodalan | Kota Malang | Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | 50 orang | 42.020.000 | Fasilitasi peningkatan akses permodalan | Kota Malang | Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | 50 orang | 42.020.000 |  |
|  | 8. Fasilitasi klinik koperasi | 5 kecamatan | Jumlah pengurus/ pengawas/pengelola/anggota koperasi yang melakukan konsultasi | 380 orang | 91.290.000 | Fasilitasi klinik koperasi | 5 kecamatan | Jumlah pengurus/ pengawas/pengelola/anggota koperasi yang melakukan konsultasi | 380 orang | 91.290.000 |  |
|  | 9. Penilaian kesehatan bagi USP/KSP | Koperasi binaan dikopindag | Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya | 70 koperasi | 129.140.000 | Penilaian kesehatan bagi USP/KSP | Koperasi binaan dikopindag | Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya | 70 koperasi | 129.140.000 |  |
|  | 10. Pembinaan kepatuhan KSP/USP Koperasi | Koperasi binaan dikopindag | Jumlah koperasi yang patuh | 90 koperasi | 69.948.700 | Pembinaan kepatuhan KSP/USP Koperasi | Koperasi binaan dikopindag | Jumlah koperasi yang patuh | 90 koperasi | 69.948.700 |  |
| II | Program Pengembangan Usaha Mikro |  | Persentase pertumbuhan unit usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 40,79% | **2.373.831.700** | Program Pengembangan Usaha Mikro |  | Persentase pertumbuhan unit usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil | 40,79% | **1.829.395.000** |  |
|  | 1. Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha | 40 usaha mikro | 146.580.000 | Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha | 40 usaha mikro | 59.855.000 |  |
|  | 2. Klinik usaha mikro | 5 kecamatan | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | 3.888 UM | 143.320.000 | Klinik usaha mikro | 5 kecamatan | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | 3.888 org | 248.050.000 |  |
|  | 3. Forum komunikasi para pakar pelaku usaha mikro | Kota Malang | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 60 orang | 213.500 | Forum komunikasi para pakar pelaku usaha mikro | Kota Malang | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 60 um | 213.500 |  |
|  | 4. Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga | Kecamatan Kedungkandang | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | 20 UM | 75.080.000 | Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga | Kecamatan Kedungkandang | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | 20 UM | 61.305.000 |  |
|  | 5. Fasilitasi pendampingan pemberdayaan usaha mikro | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan prmberdayaan | 38 UM | 2.130.000 | Fasilitasi pendampingan pemberdayaan usaha mikro | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan prmberdayaan | 38 UM | 770.000 |  |
|  | 6. Sosialisasi pelatihan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | 55 UM | 39.940.000 | Pelatihan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | 55 UM | 40.566.500 |  |
|  | 7. Penyusunan database usaha mikro | Kota Malang | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | 1 aplikasi | 144.837.000 | Penyusunan database usaha mikro | Kota Malang | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | 1 aplikasi | 174.700.000 |  |
|  | 8. Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro Kota Malang | Pulau Jawa | Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 35 UM | 298.406.200 | Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro Kota Malang | Pulau Jawa | Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 35 UM | 755.246.500 |  |
|  | 9. Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | 73 UM | 1.485.820.000 | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | 73 UM | 445.543.500 |  |
|  | 10. Temu bisnis bagi pelaku usaha mikro | Bali | Jumlah kerjasama atau MoU dari kegiatan temu bisnis | 4 MoU | 37.505.000 | Temu bisnis bagi pelaku usaha mikro | Kota Malang | Jumlah kerjasama atau MoU dari kegiatan temu bisnis | 4 MoU | 43.145.000 |  |
| III | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro |  | Persentase WUB mikro yang tumbuh | 48,60% | **700.000.000** | Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro |  | Persentase WUB mikro yang tumbuh | 48,60% | **697.122.000** |  |
|  | 1. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Kota Malang | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 300 org | 469.035.000 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Kota Malang | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 420 orang | 466.157.000 |  |
|  | 2. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat(usaha mikro) | Kota Malang | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | 135 orang | 230.965.000 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat(usaha mikro) | Kota Malang | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | 70 orang | 230.965.000 |  |
|  | Urusan Pilihan |  |  |  | **28.204.392.980** | **Urusan Pilihan** |  |  |  | **23.410.093.000** |  |
|  | Perindustrian |  |  |  | **3.526.024.000** | Perindustrian |  |  |  | **2.902.429.000** |  |
| IV | Program Pembinaan Industri |  | Persentase IHT yang dibina | 30% | **100.000.000** | Program Pembinaan Industri |  | Persentase IHT yang dibina | 30% | 100.000.000 |  |
|  | 1. Pemetaan Industri Hasil tembakau | Kota Malang | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dokumen | 50.000.000 | Pemetaan Industri Hasil tembakau | Kota Malang | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dokumen | 50.000.000 |  |
|  | 2. Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok | Kota Malang | Jumlah mesin pelinting yang di awasi | 40 mesin pelinting rokok | 50.000.000 | Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok | Kota Malang | Jumlah mesin pelinting yang di awasi | 40 mesin pelinting rokok | 50.000.000 |  |
| V | Program Pengembangan Industri |  | Persentase peningkatan jumlah IKM | 2% | **3.426.024.000** | Program Pengembangan Industri |  | Persentase peningkatan jumlah IKM | 2% | 2.802.429.000 |  |
|  | 1. Pemetaan penyediaan bahan baku | Kota Malang | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | 1 dokumen | 1.490.000 | Pemetaan penyediaan bahan baku | Kota Malang | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | 1 dokumen | 1.490.000 |  |
|  | 2. Penguatan kelembagaan IKM | Kota Malang | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 300org | 94.700.000 | Penguatan kelembagaan IKM | Kota Malang | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 3 IKM | 75.000.000 |  |
|  | 3. Forum stakeholder industri | Kota Malang | Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang | 50 org | 55.130.000 | Forum stakeholder industri | Kota Malang | Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang | 50 org | 45.000.000 |  |
|  | 4. Pemantauan dan pengawasan IKM | Kota Malang | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 100 IKM | 32.490.000 | Pemantauan dan pengawasan IKM | Kota Malang | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 100 IKM | 25.000.000 |  |
|  | 5. Pengembangan dan pendampingan industri hijau | Kota Malang | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 5 IKM | 3.000.000 | Pengembangan dan pendampingan industri hijau | Kota Malang | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 1 IKM | 3.000.000 |  |
|  | 6. Fasilitasi standarisasi industri dan KI | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi | 20 IKM | 373.080.000 | Fasilitasi standarisasi industri dan KI | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi | 20 IKM | 250.000.000 |  |
|  | 7. Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM | 98.280.000 | Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM | 75.000.000 |  |
|  | 8. Penyuluhan bagi IKM | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 300 IKM | 1.440.000 | Penyuluhan bagi IKM | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 300 IKM | 75.000.000 |  |
|  | 9. Inkubator industri | Kota Malang | Jumlah IKM yang telah diinkubasi | 100 IKM | 330.320.000 | Inkubator industri | Kota Malang | Jumlah IKM yang telah diinkubasi | 100 IKM | 250.000.000 |  |
|  | 10. Pencitraan produk industri kreatif | Kota Malang | Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang di branding | 2 jenis | 272.940.000 | Pencitraan produk industri kreatif | Kota Malang | Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang di branding | 2 jenis | 200.000.000 |  |
|  | 11. Operasional dan aktivasi MCC | Kota Malang | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 2000 pelaku kreatif | 312.610.000 | Operasional dan aktivasi MCC | Kota Malang | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 2000 org | 281.449.000 |  |
|  | 12. Penyelenggaraan event industri kreatif | Kota Malang | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 800 pelaku industri kreatif | 689.930.000 | Penyelenggaraan event industri kreatif | Kota Malang | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 800 pelaku industri kreatif | 500.000.000 |  |
|  | 13. Workshop teknis industri kreatif | Kota Malang | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | 600 IKM kreatif | 345.930.000 | Workshop teknis industri kreatif | Kota Malang | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | 600 IKM kreatif | 250.000.000 |  |
|  | 14. Pengembangan kemitraan bagi industri | Kota Malang | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 perjanjian kerjasama | 33.750.000 | Pengembangan kemitraan bagi industri | Kota Malang | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 org | 50.000.000 |  |
|  | 15. Peningkatan desain dan teknologi | Kota Malang | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi | 100 produk | 1.490.000 | Peningkatan desain dan teknologi | Kota Malang | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi | 10 produk | 1.490.000 |  |
|  | 16. Pengembangan produk IKM |  | Jumlah produk yang dikembangkan | 16 ikm | 37.734.000 | Pengembangan produk IKM |  | Jumlah produk yang dikembangkan | 16 produk | 50.000.000 |  |
|  | 17. Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri | Kota Malang | Jumlah SDM industri yang tersertifikasi | 25 ikm | 202.160.000 | Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri | Kota Malang | Jumlah SDM industri yang tersertifikasi | 25 orang | 150.000.000 |  |
|  | 18. Pengembangan/ revitalisasi sentra IKM | Kota Malang | Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi | 1 sentra IKM | 227.040.000 | Pengembangan/ revitalisasi sentra IKM | Kota Malang | Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi | 1 IKM | 250.000.000 |  |
|  | 19. Pengembangan sistem informasi data industri | Kota Malang | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 sistem iinformasi data yang dimutakhirkan | 141.190.000 | Pengembangan sistem informasi data industri | Kota Malang | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 sistem | 120.000.000 |  |
|  | 20. Penumbuhan wirausahan baru industri | Kota Malang | Jumlah WUB industri | 80 ikm | 171.320.000 | Penumbuhan wirausahan baru industri | Kota Malang | Jumlah WUB industri | 80 | 150.000.000 |  |
|  | **Perdagangan** |  |  |  | **24.678.368.980** | **Perdagangan** |  |  |  | **20.507.664.000** |  |
| VI | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal |  | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 100% | **100.000.000** | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal |  | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 100% | **100.000.000** |  |
|  | 1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran | Kota Malang | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 8 kali pengawasan dan 2 kali sosialisasi | 100.000.000 | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran | Kota Malang | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 8 kali | 100.000.000 |  |
| VII | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar |  | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 11,54% | **22.930.868.380** | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar |  | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 8% | **18.760.163.400** |  |
|  | 1. Revitalisasi Pasar | 4 pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 2 pasar | 12.470.620.000 | Revitalisasi Pasar | Kota Malang | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 5 pasar | 8.654.915.020 |  |
|  | 2. Rehabilitasi ringan/sedang/ berat gedung bangunan pasar rakyat | 9 pasar | Jumlah pasar yang terpelihara | 9 pasar | 1.742.909.180 | Rehabilitasi ringan/sedang/ berat gedung bangunan pasar rakyat | Kota Malang | Jumlah pasar yang terpelihara | 9 pasar | 1.742.909.180 |  |
|  | 3. Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar | 4 pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 472 pedagang | 1.028.480.000 | Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar | Kota Malang | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 472 pedagang | 973.480.000 |  |
|  | 4. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pasar | Kota Malang | Jumlah pengadaan gerobak sampah | 80 unit gerobak sampah | 423.980.000 | Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pasar | Kota Malang | Jumlah pengadaan gerobak sampah | 80 unit | 423.980.000 |  |
|  | 5. Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI | 130 pedagang | 131.430.000 | Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI | 130 peserta | 131.430.000 |  |
|  | 8. Pengawasan dan pengendalian PKL | Kota Malang | Jumlah papan himbauan PKL | 23 unit | 73.398.000 | Pengawasan dan pengendalian PKL | Kota Malang | Jumlah papan himbauan PKL | 23 unit | 73.398.000 |  |
|  | 9. Penataan dan penyuluhan PKL | Hotel di Kota Malang | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | 110 PKL | 67.750.000 | Penataan dan penyuluhan PKL | Hotel di Kota Malang | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | 110 PKL | 67.750.000 |  |
|  | 10. Operasional UPT. Pasar | UPT. Pasar | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 7 jenis | 6.992.301.200 | Operasional UPT. Pasar | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 7 jenis | 6.692.301.200 |  |
| VIII | Program Bina Perdagangan |  | Persentase peningkatan UTTP bertanda tera sah | 100% | **1.647.500.600** | Program Bina Perdagangan |  | Persentase peningkatan UTTP bertanda tera sah | 100% | **1.647.500.600** |  |
|  |  |  | Persentase pertumbuhan UKM | 1% |  |  |  | Persentase pertumbuhan UKM | 1% |  |  |
|  | 1. Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | Kota Malang | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media cetak, televise dan radio | 90 kali | 143.780.000 | Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | Kota Malang | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media cetak, televise dan radio | 90 kali | 143.780.000 |  |
|  | 2. Operasi pasar dan pasar murah | Kota Malang | Jumlah komoditi yang menerima bantuan angkut | 4 komoditi | 69.305.200 | Operasi pasar dan pasar murah | Kota Malang | Jumlah komoditi yang menerima bantuan angkut | 1 kali | 69.305.200 |  |
|  | 3. Pemantauan ketersediaan atau distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Kota Malang | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 1 kali | 27.970.000 | Pemantauan ketersediaan atau distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Kota Malang | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 1 kali | 27.970.000 |  |
|  | 4. Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Kota Malang | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 hari | 69.050.000 | Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Kota Malang | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 hari | 69.050.000 |  |
|  | 5. Operasional UPT. Metrologi | UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 17 jenis | 385.395.400 | Operasional UPT. Metrologi | UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 17 jenis | 385.395.400 |  |
|  | 6. Pelayanan tera dan tera ulang | Kota Malang | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 13.400 UTTP | 4.125.000 | Pelayanan tera dan tera ulang | Kota Malang | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 13.400 UTTP | 4.125.000 |  |
|  | 7. Penyuluhan kemetrologian | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | 100 peserta | 26.045.000 | Penyuluhan kemetrologian | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | 250 peserta | 26.045.000 |  |
|  | 9. Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha | Hotel di Kota Malang | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 80 UKM | 45.570.000 | Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha | Hotel di Kota Malang | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 80 UKM | 45.570.000 |  |
|  | 10. Promosi perdagangan produk Kota Malang | Indonesia | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 10 UKM | 452.070.000 | Promosi perdagangan produk Kota Malang | Indonesia | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 10 UKM | 452.070.000 |  |
|  | 11. Sosialisasi legalitas usaha perdagangan | Hotel di Kota Malang | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 60 UKM | 45.345.000 | Sosialisasi legalitas usaha perdagangan | Hotel di Kota Malang | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 60 UKM | 45.345.000 |  |
|  | 12. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | 4 kali | 39.605.000 | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | 5 | 39.605.000 |  |
|  | 13. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/ distribusi perdagangan | Toko modern di Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan | 4 kali | 29.560.000 | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan | Toko modern di Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan | 5 | 29.560.000 |  |
|  | 14. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | 4 kali | 39.560.000 | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | 5 | 39.560.000 |  |
|  | 15. Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 50 UKM | 37.815.000 | Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 50 UKM | 37.815.000 |  |
|  | 16. E-commerce bagi UKM Kota Malang | Dikopindag | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 200 UKM | 30.505.000 | E-commerce bagi UKM Kota Malang | Dikopindag | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 200 UKM | 30.505.000 |  |
|  | 17. Pengembangan dan pemutakhiran data UKM | Kota Malang | Jumlah dokumen data UKM | 500 UKM | 55.800.000 | Pengembangan dan pemutakhiran data UKM | Kota Malang | Jumlah dokumen data UKM | 500 UKM | 55.800.000 |  |
|  | 18. Sosialisasi konsumen cerdas | Salah satu hotel di Kota Malang | Jumlah peserta konsumen cerdas | 125 org | 100.000.000 | Sosialisasi konsumen cerdas | Salah satu hotel di Kota Malang | Jumlah peserta konsumen cerdas | 125 org | 100.000.000 |  |
|  | 19. Pos ukur ulang barang non BDKT | Kota Malang | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali | 46.000.000 | Pos ukur ulang barang non BDKT | Kota Malang | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali | 46.000.000 |  |
|  | Urusan Umum |  |  |  | **7.579.878.620** | **Urusan Umum** |  |  |  | **6.275.749.000** |  |
|  | Umum |  |  |  | **7.579.878.620** | **Umum** |  |  |  | **6.275.749.000** |  |
| IX | Program Pelayanan Kesekretariatan |  | Persentase dokumen perencanaana, keuangan dan pelaporan yang di susun tepat waktu | 100% | **7.579.878.620** | Program Pelayanan Kesekretariatan |  | Persentase dokumen perencanaana, keuangan dan pelaporan yang di susun tepat waktu | 100% | **6.275.749.000** |  |
|  | 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah | Dikopindag | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 1 dokumen | 100.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 1 dokumen | 175.000.000 |  |
|  | 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Dikopindag | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen | 1.500.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen | 1.500.000 |  |
|  | 3. Penyusunan Laporan Keuangan | Dikopindag | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen | 99.480.000 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen | 99.480.000 |  |
|  | 4. Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat | Dikopindag | Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasaan Masyarakat | 2 dokumen | 500.000 | Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasaan Masyarakat | 2 dokumen | 500.000 |  |
|  | 5. Penyusunan/ Review Standar Pelayanan | Dikopindag | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2 dokumen | 31.930.000 | Penyusunan/ Review Standar Pelayanan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2 dokumen | 31.930.000 |  |
|  | 6. Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Dikopindag | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | 1.000.000 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | 1.000.000 |  |
|  | 7. Penyusunan/ Review Renstra | Dikopindag | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | 500.000 | Penyusunan/ Review Renstra | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | 500.000 |  |
|  | 8. Penyusunan Renja/RKT | Dikopindag | Jumlah dokumen Renja/RKT | 1 dokumen | 71.150.000 | Penyusunan Renja/RKT | Salah satu hotel di Kota Malang | Jumlah dokumen Renja/RKT | 2 dokumen | 71.150.000 |  |
|  | 10. Penyusunan profil perangkat daerah | Dikopindag | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 dokumen | 13.760.000 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 dokumen | 213.760.000 |  |
|  | 11.   Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Dikopindag | Luas bangunan yang akan dipelihara | 250 m2 | 610.845.590 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Luas bangunan yang akan dipelihara | 250 m2 | 110.845.590 |  |
|  | 12.   Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Dikopindag | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 80 unit | 647.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 80 kendaraan | 472.000.000 |  |
|  | 13.   Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Dikopindag | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis | 50.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis | 50.000.000 |  |
|  | 14.   Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dikopindag | Jumlah Surat yang teradministrasi dengan baik | 4.101 surat | 877.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah Surat yang teradministrasi dengan baik | 4.101 surat | 877.500.000 |  |
|  | 15.   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dikopindag | Jumlah bulan pembayaran telepon, air, dan listrik | 12 bulan | 457.205.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah bulan pembayaran telepon, air, dan listrik | 12 bulan | 457.205.000 |  |
|  | 16.   Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Dikopindag | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2.755 m2 | 180.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2.755 m2 | 180.000.000 |  |
|  | 17.   Penyediaan Alat Tulis Kantor | Dikopindag | Jumlah alat tulis kantor | 87 jenis ATK | 260.978.023 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah alat tulis kantor | 87 jenis ATK | 260.978.023 |  |
|  | 18.   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dikopindag | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis | 712.884.807 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis | 687.884.807 |  |
|  | 19.   Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor | Dikopindag | Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 20.000.000 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 20.000.000 |  |
|  | 20.   Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Dikopindag | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 jenis surat kabar | 20.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 jenis | 20.000.000 |  |
|  | 21.   Penyediaan Makanan dan Minuman | Dikopindag | Jumlah makanan dan minuman | 7849 kotak | 406.525.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah makanan dan minuman | 7849 kotak | 331.525.000 |  |
|  | 22. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 80 kali | 1.574.840.200 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 80 kali | 770.710.580 |  |
|  | 23. Peringatan/ Kegiatan Insidentil | Dikopindag | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil | 1 kali | 60.000.000 | Peringatan/ Kegiatan Insidentil | Kota Malang | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil | 1 kali | 60000000 |  |
|  | 24. Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Dikopindag | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | 100.000.000 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Dikopindag | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | 100.000.000 |  |
|  | 26.   Pengadaan BBM dan Pelumas | Dikopindag | Jumlah /volume BBM dan pelumas | 83.479 liter | 950.000.000 | Pengadaan BBM dan Pelumas | jl.trunojoyo no.1 Kota Malang | Jumlah /volume BBM dan pelumas | 83.479 liter | 950.000.000 |  |
|  | 27.   Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Dikopindag | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 82 org | 300.000.000 | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 82 org | 300.000.000 |  |
|  | Penyusunan Bahan Anjab / ABK | Dikopindag | Jumlah Bahan Anjab / ABK PD | 1 dokumen | 32.280.000 | Penyusunan Bahan Anjab / ABK | Dikopindag | Jumlah Bahan Anjab / ABK PD | 1 dokumen | 32.280.000 |  |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2020

1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel: T-C. 32

Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kota Malang

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan

| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **URAIAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **VOLUME** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **CATATAN PENTING** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Belanja Langsung** |  |  |  |  | **32.974.779.000** |  |
|  | **Urusan Wajib** |  |  |  |  | **3.288.937.000** |  |
|  | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  |  | **3.288.937.000** |  |
|  | **Program Pembinaan Koperasi** |  |  | **Persentase koperasi aktif** | **87,10%** | **762.420.000** |  |
|  | Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi | Memfasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi yang mempunyai tujuan tercapainya pelayanan dalam hal pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, dan peleburan serta pembubaran koperasi | Kota Malang | Jumlah unit koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi | 17 koperasi | 38.669.300 |  |
|  | Bimtek pelaksanaan rapat anggota koperasi | Memberikan bimbingan dan pembekalan kepada koperasi tentang tata cara pelaksanaan rapat anggota bagi koperasi baru maupun koperasi yang telah terbentuk dengan tujuan Koperasi mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Koperasi | Kota Malang | Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek | 75 orang | 53.635.000 |  |
|  | Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat | Sosialisasi Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat adalah menambah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan tentang perkoperasian serta mengajak generasi muda untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan semangat berkoperasi dengan tujuan terwujudnya koperasi yang berkualitas sesuai jati dirinya, sehingga diharapkan didalam kehidupan bermasyarakat dapat menerapkan jiwa dan semangat untuk berkoperasi | Kelurahan Pisang Candi | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian | 70 orang | 55.427.000 |  |
|  | Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi dengan tujuan sebagai wujud bentuk dukungan pemerintah kepada gerakan koperasi dan masyarakat umum untuk dapat turut serta memeriahkan dan menyukseskan peringatan Hari Koperasi dan mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan guna meningkatkan prestasi – prestasi koperasi | Provinsi Jawa Timur | Jumlah pengurus koperasi/masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | 300 orang | 188.170.000 |  |
|  | Peningkatan kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi |  |  | Jumlah koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | 31 sertifikat | 1.770.000 |  |
|  | Bimtek manajemen koperasi | Memberikan bimbingan dan pembekalan kepada koperasi tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen simpan pinjam koperasi, Simpan Pinjam Sektor Riil dan Laporan keuangan SAK ETAP memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan Keuangan berbasis SAK ETAP dengan tujuan Koperasi mampu menyusun standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen simpan pinjam koperasi | Kota Malang | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP | 78 koperasi | 92.350.000 |  |
|  | Fasilitasi peningkatan akses permodalan |  | Kota Malang | Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | 50 orang | 42.020.000 |  |
|  | Fasilitasi klinik koperasi | diadakannyapelaksanaan Fasilitasi klinik koperasi agar supaya membantu koperasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi yang mempunyai sifat dalam bentuk konsultasi | 5 kecamatan | Jumlah pengurus/ pengawas/pengelola/anggota koperasi yang melakukan konsultasi | 380 orang | 91.290.000 |  |
|  | Penilaian kesehatan bagi USP/KSP | Untuk mengetahui kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus dengan harapan Koperasi se Kota Malang mendapatkan Penetapan dan sertifikat kesehatan KSP/USP | Koperasi binaan dikopindag | Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya | 70 koperasi | 129.140.000 |  |
|  | Pembinaan kepatuhan KSP/USP Koperasi | Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi dengan melakukan pengawasan secara mandiri agarbudaya kepatuhan pada setiap perangkat organisasi Koperasi | Koperasi binaan dikopindag | Jumlah koperasi yang patuh | 90 koperasi | 69.948.700 |  |
|  | **Program Pengembangan Usaha Mikro** |  |  | **Persentase pertumbuhan unit usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil** | **40,79%** | **1.829.395.000** |  |
|  | Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Pelasanaan Sosialisasi Penerbitan Ijin UKM agar para pelaku usaha untuk mengetahui persyaratan perijinan | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha | 40 usaha mikro | 59.855.000 |  |
|  | Klinik usaha mikro | melaksanakan kegiatan Pendampingan Klinik/ Coaching Clinic Bisnis Usaha Mikro Kota Malang. Klinik bisnis berfungsi untuk memberikan pembelajaran dalam mengatasi problem di bidang usaha, pengembangan produk, membangun kemitraan, menuju penguatan kelembagaan dan kesinambungan usaha mikro Klinik bisnis berisi para tenaga pendamping yang berfungsi sebagai konsultan dalam pengembangan Usaha Mikro Dengan layanan konsultasi, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi usaha mikro di Kota Malang. dengan tujuan Dengan layanan klinik, dapat terwujud usaha mikro binaan naik kelas yang dapat diukur dari:1. a. lebih percaya diri dengan produk yang dihasilkan. b. Jaringan pemasaran yang lebih luas dan efektif c. Semakin banyaknya usaha mikro yang memilki legalitas usaha c. Pengelola usaha mikro semakin baik dan professional. | 5 kecamatan | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | 3.888 org | 248.050.000 |  |
|  | Forum komunikasi para pakar pelaku usaha mikro | Mendorong tumbuhnya kemitraan di antara para pelaku usaha sehingga bisa tercipta wirausahawan bekerjasama dengan investor dan wirausaha yang lainnya yang saling berkaitan sehingga terjalin kerjasama untuk meningkatkan produktifitas usahanya. | Kota Malang | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 60 um | 213.500 |  |
|  | Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga |  | Kecamatan Kedungkandang | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | 20 UM | 61.305.000 |  |
|  | Fasilitasi pendampingan pemberdayaan usaha mikro |  | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan prmberdayaan | 38 UM | 770.000 |  |
|  | Pelatihan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan |  | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | 55 UM | 40.566.500 |  |
|  | Penyusunan database usaha mikro | Penyempurnaan Database Usaha Mikro Untuk menunjang keberhasilan program pembinaan Usaha Mikro diperlukan data yang valid dan ter-update | Kota Malang | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | 1 aplikasi | 174.700.000 |  |
|  | Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro Kota Malang | Memfasilitasi Pelaksanaan Pemasaran dalam bentuk pameran UKM dalam provinsi, luar provinsi dan tingkat nasional guna memperluas jaringan pemasaran produk kreatif dan produk unggulan Kota Malang | Pulau Jawa | Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 35 UM | 755.246.500 |  |
|  | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Melatih wirausahawan agar mampu memasarkan Produk Usaha Mikro secara efektif dan efisien sehingga tepat sasaran melalui media Online | Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | 73 UM | 445.543.500 |  |
|  | Temu bisnis bagi pelaku usaha mikro | Wadah bagi pelaku bisnis (Entrepreneur) untuk mempromosikan dan mensosialisasikan produk kepada para peritel modern dan pengusaha besar kegiatan ini pela akan dilakukan pemaparan secara detail tentang keuanggulan dan kehandalan produk yang diharapkan agar mendapatkan umpan balik dari para peritel modern dan pengusaha besar | Kota Malang | Jumlah kerjasama atau MoU dari kegiatan temu bisnis | 4 MoU | 43.145.000 |  |
|  | **Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro** |  |  | **Persentase WUB mikro yang tumbuh** | **48,60%** | **697.122.000** |  |
|  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Membina dan memberikan pelatihan kepada masyarakat di Kota Malang guna menjaring wirausaha baru. Dengan tujuan Menumbuhkan wirausaha baru guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan | Kota Malang | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 420 orang | 466.157.000 |  |
|  | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat(usaha mikro) | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi usaha mikro berupa pembinaan dan memberikan pelatihan bagi usaha mikro binaan agar terus berkembang dengan mengadakan pelatihan sebagai pembekalan keterampilan dalam skill pelatihan membatik ditingkat lanjutan sehingga kualitas usaha mikro dapat lebih membaik dalam segi kualitas produknya dengan tujuan Agar Usaha Mikro mampu bertahan di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Kota Malang | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | 70 orang | 230.965.000 |  |
|  | **Urusan Pilihan** |  |  |  |  | **23.410.093.000** |  |
|  | Perindustrian |  |  |  |  | **2.902.429.000** |  |
|  | Program Pembinaan Industri |  |  | Persentase IHT yang dibina | 30% | 100.000.000 |  |
|  | Pemetaan Industri Hasil tembakau |  | Kota Malang | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dokumen | 50.000.000 |  |
|  | Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok |  | Kota Malang | Jumlah mesin pelinting yang di awasi | 40 mesin pelinting rokok | 50.000.000 |  |
|  | Program Pengembangan Industri |  |  | Persentase peningkatan jumlah IKM | 2% | 2.802.429.000 |  |
|  | Pemetaan penyediaan bahan baku |  | Kota Malang | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | 1 dokumen | 1.490.000 |  |
|  | Penguatan kelembagaan IKM |  | Kota Malang | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 3 IKM | 75.000.000 |  |
|  | Forum stakeholder industri |  | Kota Malang | Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang | 50 org | 45.000.000 |  |
|  | Pemantauan dan pengawasan IKM |  | Kota Malang | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 100 IKM | 25.000.000 |  |
|  | Pengembangan dan pendampingan industri hijau |  | Kota Malang | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 1 IKM | 3.000.000 |  |
|  | Fasilitasi standarisasi industri dan KI |  | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi | 20 IKM | 250.000.000 |  |
|  | Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM |  | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM | 75.000.000 |  |
|  | Penyuluhan bagi IKM |  | Kota Malang | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 300 IKM | 75.000.000 |  |
|  | Inkubator industri |  | Kota Malang | Jumlah IKM yang telah diinkubasi | 100 IKM | 250.000.000 |  |
|  | Pencitraan produk industri kreatif |  | Kota Malang | Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang di branding | 2 jenis | 200.000.000 |  |
|  | Operasional dan aktivasi MCC |  | Kota Malang | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 2000 org | 281.449.000 |  |
|  | Penyelenggaraan event industri kreatif |  | Kota Malang | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 800 pelaku industri kreatif | 500.000.000 |  |
|  | Workshop teknis industri kreatif |  | Kota Malang | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | 600 IKM kreatif | 250.000.000 |  |
|  | Pengembangan kemitraan bagi industri |  | Kota Malang | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 org | 50.000.000 |  |
|  | Peningkatan desain dan teknologi |  | Kota Malang | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi | 10 produk | 1.490.000 |  |
|  | Pengembangan produk IKM |  |  | Jumlah produk yang dikembangkan | 16 produk | 50.000.000 |  |
|  | Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri |  | Kota Malang | Jumlah SDM industri yang tersertifikasi | 25 orang | 150.000.000 |  |
|  | Pengembangan/ revitalisasi sentra IKM |  | Kota Malang | Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi | 1 IKM | 250.000.000 |  |
|  | Pengembangan sistem informasi data industri |  | Kota Malang | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 sistem | 120.000.000 |  |
|  | Penumbuhan wirausahan baru industri |  | Kota Malang | Jumlah WUB industri | 80 | 150.000.000 |  |
|  | **Perdagangan** |  |  |  |  | **20.507.664.000** |  |
|  | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal |  |  | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 100% | **100.000.000** |  |
|  | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran |  | Kota Malang | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 8 kali | 100.000.000 |  |
|  | Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar |  |  | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 8% | **18.760.163.400** |  |
|  | Revitalisasi Pasar |  | Kota Malang | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 5 pasar | 8.654.915.020 |  |
|  | Rehabilitasi ringan/sedang/ berat gedung bangunan pasar rakyat |  | Kota Malang | Jumlah pasar yang terpelihara | 9 pasar | 1.742.909.180 |  |
|  | Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar |  | Kota Malang | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 472 pedagang | 973.480.000 |  |
|  | Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pasar |  | Kota Malang | Jumlah pengadaan gerobak sampah | 80 unit | 423.980.000 |  |
|  | Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia |  | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI | 130 peserta | 131.430.000 |  |
|  | Pengawasan dan pengendalian PKL |  | Kota Malang | Jumlah papan himbauan PKL | 23 unit | 73.398.000 |  |
|  | Penataan dan penyuluhan PKL |  | Hotel di Kota Malang | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | 110 PKL | 67.750.000 |  |
|  | Operasional UPT. Pasar |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 7 jenis | 6.692.301.200 |  |
|  | Program Bina Perdagangan |  |  | Persentase peningkatan UTTP bertanda tera sah | 100% | **1.647.500.600** |  |
|  |  |  |  | Persentase pertumbuhan UKM | 1% |  |  |
|  | Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya |  | Kota Malang | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media cetak, televise dan radio | 90 kali | 143.780.000 |  |
|  | Operasi pasar dan pasar murah |  | Kota Malang | Jumlah komoditi yang menerima bantuan angkut | 1 kali | 69.305.200 |  |
|  | Pemantauan ketersediaan atau distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya |  | Kota Malang | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 1 kali | 27.970.000 |  |
|  | Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya |  | Kota Malang | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 hari | 69.050.000 |  |
|  | Operasional UPT. Metrologi |  | UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 17 jenis | 385.395.400 |  |
|  | Pelayanan tera dan tera ulang |  | Kota Malang | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 13.400 UTTP | 4.125.000 |  |
|  | Penyuluhan kemetrologian |  | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | 250 peserta | 26.045.000 |  |
|  | Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha |  | Hotel di Kota Malang | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 80 UKM | 45.570.000 |  |
|  | Promosi perdagangan produk Kota Malang |  | Indonesia | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 10 UKM | 452.070.000 |  |
|  | Sosialisasi legalitas usaha perdagangan |  | Hotel di Kota Malang | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 60 UKM | 45.345.000 |  |
|  | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang |  | Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | 5 | 39.605.000 |  |
|  | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan |  | Toko modern di Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan | 5 | 29.560.000 |  |
|  | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol |  | Kota Malang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | 5 | 39.560.000 |  |
|  | Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang |  | Hotel di Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 50 UKM | 37.815.000 |  |
|  | E-commerce bagi UKM Kota Malang |  | Dikopindag | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 200 UKM | 30.505.000 |  |
|  | Pengembangan dan pemutakhiran data UKM |  | Kota Malang | Jumlah dokumen data UKM | 500 UKM | 55.800.000 |  |
|  | Sosialisasi konsumen cerdas |  | Salah satu hotel di Kota Malang | Jumlah peserta konsumen cerdas | 125 org | 100.000.000 |  |
|  | Pos ukur ulang barang non BDKT |  | Kota Malang | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali | 46.000.000 |  |
|  | **Urusan Umum** |  |  |  |  | **6.275.749.000** |  |
|  | **Umum** |  |  |  |  | **6.275.749.000** |  |
|  | Program Pelayanan Kesekretariatan |  |  | Persentase dokumen perencanaana, keuangan dan pelaporan yang di susun tepat waktu | 100% | **6.275.749.000** |  |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 1 dokumen | 175.000.000 |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen | 1.500.000 |  |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen | 99.480.000 |  |
|  | Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasaan Masyarakat | 2 dokumen | 500.000 |  |
|  | Penyusunan/ Review Standar Pelayanan |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2 dokumen | 31.930.000 |  |
|  | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | 1.000.000 |  |
|  | Penyusunan/ Review Renstra |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | 500.000 |  |
|  | Penyusunan Renja/RKT |  | Salah satu hotel di Kota Malang | Jumlah dokumen Renja/RKT | 2 dokumen | 71.150.000 |  |
|  | Penyusunan profil perangkat daerah |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 dokumen | 213.760.000 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Luas bangunan yang akan dipelihara | 250 m2 | 110.845.590 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 80 kendaraan | 472.000.000 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis | 50.000.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah Surat yang teradministrasi dengan baik | 4.101 surat | 877.500.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah bulan pembayaran telepon, air, dan listrik | 12 bulan | 457.205.000 |  |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2.755 m2 | 180.000.000 |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah alat tulis kantor | 87 jenis ATK | 260.978.023 |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis | 687.884.807 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 20.000.000 |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 jenis | 20.000.000 |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Jumlah makanan dan minuman | 7849 kotak | 331.525.000 |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |  | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 80 kali | 770.710.580 |  |
|  | Peringatan/ Kegiatan Insidentil |  | Kota Malang | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil | 1 kali | 60.000.000 |  |
|  | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor |  | Dikopindag | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | 100.000.000 |  |
|  | Pengadaan BBM dan Pelumas |  | jl.trunojoyo no.1 Kota Malang | Jumlah /volume BBM dan pelumas | 83.479 liter | 950.000.000 |  |
|  | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 82 org | 300.000.000 |  |
|  | Penyusunan Bahan Anjab / ABK |  | Dikopindag | Jumlah Bahan Anjab / ABK PD | 1 dokumen | 32.280.000 |  |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2020

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional/Daerah

Telaah terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Malang, dimana secara teknokratis prioritas telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018 – 2024 dicanangkan visi pembangunan Kota Malang.

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI diuraikan bahwa Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada urusan koperasi dan usaha mikro, amat penting.

Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan leader perekonomian Indonesia dan menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan Usaha Mikro.

| No. | Sub Urusan Wajib | Kewenangan  Kab/ Kota | Program | Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendidikan dan Latihan perkoperasian | * Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/ kota | Program Pembinaan Koperasi | * Peningkatan Kapasitas manajer KSP/ USP dan Sertifikasi * Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi koperasi |
|  |  |  |  | * Bimtek Pelaksanaan RAT Koperasi |
|  |  |  |  | * Bimtek penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAK ETAP |
|  |  |  |  | * Bimtek SOP dan SOM simpan pinjam Koperasi |
|  |  |  |  | * Bimtek akuntansi Simpan pinjam |
|  |  |  |  | * Bimtek Koperasi Sariah |
|  |  |  |  | * Bimtek perhitungan pajak bagi koperasi |
| 2. | Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi | * Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota | Program PembinaanKoperasi | * Penyusunan Naskah Akademis dan ranperda tentang perlindungan dan pemebrdayaan koperasi dan usaha mikro |
|  |  |  |  | * Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi |
|  |  |  |  | * Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat |
|  |  |  |  | * Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi |
|  |  |  |  | * Fasilitasi kegiatan Dekopinda |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Pengawasan dan Pemeriksaan | * Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang dalam daerah | Program Pembinaan Koperasi | * Pemeriksaan dan penguatan administrasi kooperasi |
|  |  | * Pemeriksaan& Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit simpat pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah |  | * Bimtek Manajemen Pengawasan Koperasi |
|  | Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam koperasi yang wialaya keanggotaaanya dalam daerah Kab/Kota | Program Pembinaan Koperasi | * Pembinaan dan penilaian kesehatan bagi USP / KSP |
| 4. | Pemberdayaan usaha menengah , usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan , kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Program pengembangan Usaha Mikro | * Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro |
|  |  | * Fasilitasi klnik usaha mikro |
|  |  | * Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro |
|  |  | * Reviu penyusunan database usaha mikro |
|  |  |  |  | * Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM |
| 5. | Pengembangan UMKM | Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjasi menjadi usaha kecil | Program pengembangan Usaha Mikro | * Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro kota malang |
|  |  | * Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro |
|  |  |  |  | * Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro |
|  |  |  |  | * Gelar Produk UMKM |
|  |  |  | Program pembinaan lingkungan sosial di bidang usaha mikro | * Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) |
|  |  |  | * Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) |

Sumber : Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2020

1. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar luar Propinsi maupun Nasional.
2. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
3. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapisitas kelembagaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ;
2. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dan Lintas PD dalam pengembangan urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Malang
3. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Malang.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035, visi pengembangan industri nasional adalah :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

* 1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
  2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
  3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
  4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
  5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
  6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
  7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

* 1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
  2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
  3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
  4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
  5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
  6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
  7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
  8. Melakukan pembangunan industri hijau;
  9. Melakukan pembangunan industri strategis;
  10. Melakukan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; dan
  11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

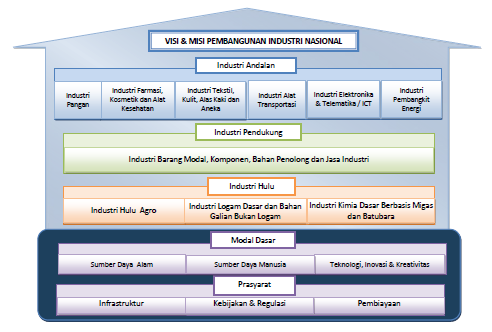
1. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

1. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

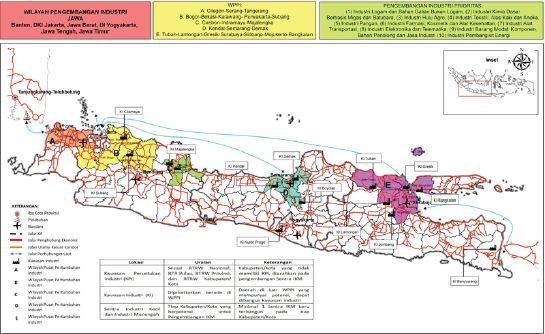
Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional

(Sumber: PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035)

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) meliputi Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri (KI) yang ditetapkan meliputi KI Tuban, KI Lamongan KI Gresik, KI Bangkalan, KI Jombang, dan KI Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Kawasan Industri diprioritaskan berada di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Namun daerah di luar WPPI namun mempunyai potensi untuk dapat dibangun Kawasan Industri masih dapat dibangun Kawasan Industri. Dengan demikian maka Kota Malang diposisikan sebagai penyangga dari WPPI yang ada di Provinsi Jawa Timur. Meskipun tidak termasuk dalam WPPI maupun tidak ditetapkan mempunyai Kawasan Industri, Kota Malang mempunyai peluang untuk mengembangkan industri melalui Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dimana setiap kabupaten/kota kemungkinan besar mempunyai minimal 1 sentra industri kecil dan menengah. Maka dari itu pembangunan industri di Kota Malang lebih difokuskan pada pengembangan industri kecil dan menengah sesuai amanat dari RIPIN.

Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Pulau Jawa

(*Sumber : PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*

Program pembangunan bidang perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2019 masih diselaraskan dengan Nawa Cita atau sembilan agenda nasional khususnya pada point ke enam dan ke tujuh yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan pembangunan perdagangan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Perdagangan yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan meliputi :

* + 1. Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian nasional;
    2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
    3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan perdagangan;
    4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
    5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
    6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan; dan
    7. Menguatnya struktur perdagangan.

Kementerian Perdagangan merumuskan 14 (empat belas) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

* + 1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
    2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
    3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
    4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
    5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
    6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
    7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
    8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
    9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
    10. Peningkatan perlindungan konsumen;
    11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
    12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
    13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; dan
    14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menentukan kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung UKM yang kreatif dan inovatif, meningkatkan peran UKM untuk meningkatkan daya saing perdagangan, meningkatkan ekspor dan import mengembangkan potensi pasar tradisional setara dengan pasar modern serta penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan PKL .

Selain itu kebijakan lain yang selaras antara lain memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan produk ekspor, serta meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi. Perkembangan kegiatan perekonomian Kota Malang dicerminkan dengan PDRB menurut harga konstan maupun harga berlaku. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi *Renaisans* Ekonomi yang sinergis dalm rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Malang, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. Adapun peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2021 dilakukan melalui pembangunan secara terencana untuk menyempurnakan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

* + - 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif
      2. Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro;
2. Meningkatnya kualitas pasar;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok;
4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri; dan
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.
   1. Program Dan Kegiatan

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam pencapaian program prioritas maka disusun program dan kegiatan sesuai kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang menjabarkan Visi dan Misi tersebut. Selain Hal tersebut diharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan dapat memberikan dukungan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Malang dengan menjaring aspirasi dan masyarakat melalui forum perangkat daerah.

Tahun 2021 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merencanakan 9 program yang terdiri dari 97 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32.974.779.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik itu jenis kegiatan maupun pagu Indikatif. Hal ini karena beberapa pertimbangan analisis kebutuhan serta prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan juga dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang ingin dicapai sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang membuat program dan kegiatan agar dapat merealisasikan tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan di Kota Malang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tahun 2018-2023 yang merupakan turunan dari RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Secara lengkap rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 beserta proyeksi maju tahun 2022 dapat dilihat pada Bab IV yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan faslitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD Lingkup Pemerintah Daerah Kota Malang maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dilihat sebagaimana pada tabel T-C 33.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Kota Malang

| **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Formula Perhitungan** | **Target 2021** | **Kode Program/Kegiatan** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Program/Kegiatan** | **Target capaian Tahun Anggaran 2021** | | | **Lokasi** | **Kelompok Sasaran** | **Catatan Penting** | **Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Keluaran** | **Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Keluaran** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Belanja Langsung** |  |  | **32.974.779.000** |  |  |  |  |  | **91.613.055.854** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Urusan Wajib** |  |  | **3.288.937.000** |  |  |  |  |  | **3.455.202.857** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** |  |  | **3.288.937.000** |  |  |  |  |  | **3.455.202.857** |
| **Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro** | **Persentase koperasi sehat** | **Jumlah Koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi aktif dikali 100 %** | **70,05%** |  |  |  |  | **Program Pembinaan Koperasi** | **Persentase koperasi aktif** | **87,10%** | **762.420.000** |  |  |  |  |  | **763.665.550** |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 11 | Fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi | Jumlah unit koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi | 17 koperasi | 38.669.300 | Block Grant | Koperasi binaan Dikopindang | Pengurus koperasi |  | 20 kop | 40.675.500 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 1 | Bimtek pelaksanaan rapat anggota koperasi | Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek | 75 orang | 53.635.000 | Block Grant | Kota Malang | Pengurus koperasi |  | 86 kop | 54.751.500 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 3 | Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian | 70 orang | 55.427.000 | Block Grant | Kelurahan Pisang Candi | Masyarakat |  | 81 org | 56.783.550 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 4 | Fasilitasi partisipasi koperasi dan masyarakat dalam peringatan hari koperasi | Jumlah pengurus koperasi/masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | 300 orang | 188.170.000 | Block Grant | Provinsi Jawa Timur | Pengurus koperasi dan masyarakat |  | 345 org | 215.590.500 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 17 | Peningkatan kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi | Jumlah koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | 31 sertifikat | 1.770.000 | Block Grant | Kota Malang | Pengurus koperasi |  | 40 sertifikat | 2.035.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 13 | Bimtek manajemen koperasi | Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP | 78 koperasi | 92.350.000 | Block Grant | Kota Malang | Badan pengawas koperasi |  | 90 kop | 91.827.500 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 16 | Fasilitasi peningkatan akses permodalan | Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | 50 kop | 42.020.000 | Block Grant | Kota Malang | Pengurus koperasi |  | 58 kop | 45.000.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 6 | Fasilitasi klinik koperasi | Jumlah pengurus/ pengawas/pengelola/anggota koperasi yang melakukan konsultasi | 380 orang | 91.290.000 | Block Grant | 5 kecamatan | Pengurus koperasi |  | 437 org | 104.581.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 14 | Penilaian kesehatan bagi USP/KSP | Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya | 70 surat | 129.140.000 | Block Grant | Koperasi binaan dikopindag | Koperasi di kota malang |  | 81 kop | 136.436.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 10 | Pembinaan kepatuhan KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi yang patuh | 90 surat | 69.948.700 | Block Grant | Koperasi binaan dikopindag | Koperasi di kota malang |  | 104 kop | 15.985.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meningkatnya kualitas koperasi dan usha mikro** | **Persentase pertumbuhan usaha kecil** | **Jumlah pertumbuhan usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil dibagi jumlah seluruh usaha mikro dikali 100%** | **40,79%** |  |  |  |  | **Program Pengembangan Usaha Mikro** | **Persentase pertumbuhan unit usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil** | **70,39%** | **1.829.395.000** |  |  |  |  |  | **1.886.537.307** |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 7 | Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha | 40 | 59.855.000 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 52 um | 168.567.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 1 | Klinik usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik | 3.888 org | 248.050.000 | Block Grant | 5 kecamatan | Usaha Mikro |  | 4471 um | 164.818.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 3 | Forum komunikasi para pakar pelaku usaha mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 60 um | 213.500 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 69 um | 1.250.507 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 5 | Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | 20 UM | 61.305.000 | Block Grant | Kecamatan Kedungkandang | Usaha Mikro |  | 23 um | 86.342.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 6 | Fasilitasi pendampingan pemberdayaan usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan prmberdayaan | 38 UM | 770.000 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 44 um | 2.449.500 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 10 | Pelatihan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu, desain produk usaha, dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | 55 UM | 40.566.500 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 63 um | 45.954.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 4 | Penyusunan database usaha mikro | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | 1 aplikasi | 174.700.000 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 1 aplikasi | 167.942.550 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 8 | Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha mikro Kota Malang | Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 35 UM | 1.125.790.000 | Block Grant | Pulau Jawa | Usaha Mikro |  | 40 um | 1.125.790.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 9 | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | 73 UM | 75.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 84 um | 80.293.000 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 17 | 2 | Temu bisnis bagi pelaku usaha mikro | Jumlah kerjasama atau MoU dari kegiatan temu bisnis | 4 um | 43.145.000 | Block Grant | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 5 mou | 43.130.750 |
| **Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro** | **Persentase pertumbuhan usaha kecil** |  | **72,48%** |  |  |  |  | **Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro** | **Persentase WUB mikro yang tumbuh** | **48,60%** | **697.122.000** |  |  |  |  |  | **805.000.000** |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 18 | 1 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 300 orang | 466.157.000 | DBHCHT | Kota Malang | Tenaga Kerja dan Masyarakat |  | 345 org | 539.390.250 |
|  |  |  |  | 1 | 17 | 18 | 2 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat(usaha mikro) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | 135 orang | 230.965.000 | DBHCHT | Kota Malang | Usaha Mikro |  | 155 um | 265.609.750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Urusan Pilihan** |  |  | **23.410.093.000** |  |  |  |  |  | **33.868.962.935** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Perindustrian** |  |  | **2.902.429.000** |  | Kota Malang |  |  |  | **4.859.911.500** |
| **Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri** | **Pertumbuhan industri** | **Laju pertumbuhan industri tahun berjalan** | **4,15** |  |  |  |  | **Program Pembinaan Industri** | **Persentase IHT yang dibina** | **30%** | **100.000.000** |  | Kota Malang |  |  |  | **115.000.000** |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 29 | 2 | Pemetaan Industri Hasil tembakau | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dokumen | 50.000.000 |  | Kota Malang | Industri Hasil tembakau Kota Malang |  | 1 dokumen | 57.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 29 | 1 | Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok | Jumlah mesin pelinting yang di awasi | 40 mesin pelinting rokok | 50.000.000 |  | Kota Malang | Industri hasil tembakau kota malang yang memproduksi skm (sigaret kretek mesin) |  | 46 mesin pelinting rokok | 57.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program Pengembangan Industri** | **Persentase peningkatan jumlah IKM** | **2%** | **2.802.429.000** |  |  |  |  |  | **4.744.911.500** |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 11 | Pemetaan penyediaan bahan baku | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | 1 dokumen | 1.490.000 | Block Grant | Kota Malang | Pelaku Industri Kecil menenengah Kota Malang |  | 1 dokumen | - |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 14 | Penguatan kelembagaan IKM | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 300 IKM | 75.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Lembaga di sektor industri kecil menengah Kota Malang |  | 300 ikm | - |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 5 | Forum stakeholder industri | Jumlah dokumen perumusan rancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang | 50 org | 45.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Stakeholder industri Kota Malang |  | 50 org | 70.150.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 19 | Pemantauan dan pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 100 IKM | 25.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM Kota Malang |  | 100 ikm | 57.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 9 | Pengembangan dan pendampingan industri hijau | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 1 IKM | 3.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Industri Tekstil |  | 1 ikm | 3.450.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 15 | Fasilitasi standarisasi industri dan KI | Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi | 20 IKM | 250.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM Industri Kota Malang |  | 20 ikm | 454.250.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 10 | Pembinaan Penerapan Standar Mutu Produk IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM | 75.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM Kota Malang |  | 50 ikm | 149.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 17 | Penyuluhan bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 300 IKM | 75.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM Kota Malang |  | 300 ikm | 1.713.500 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 13 | Inkubator industri | Jumlah IKM yang telah diinkubasi | 100 IKM | 250.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM Kota Malang |  | 100 ikm | 460.000.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 1 | Pencitraan produk industri kreatif | Jumlah jenis sub sektor industri kreatif yang di branding | 2 jenis | 200.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Masyarakat |  | 2 jenis | 316.250.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 6 | Operasional dan aktivasi MCC | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 2000 org | 281.449.000 | Block Grant | Kota Malang | Pelaku ekonomi kretaif serta stakke holder sektor ekonomi kreatif Kota Malang |  | 2000 org | 575.000.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 3 | Penyelenggaraan event industri kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 800 org | 500.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM /Komunitas Kreatif |  | 800 org | 1.051.675.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 4 | Workshop teknis industri kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | 600 IKM | 250.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM sektor animasi, kriya, kuliner |  | 600 ikm | 402.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 2 | Pengembangan kemitraan bagi industri | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 org | 50.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Akademisi, komunitas industri, dan pelaku industri/bisnis kota malang |  | 3 org | 47.725.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 8 | Peningkatan desain dan teknologi | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi | 10 unit | 1.490.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM olahan kripik kota malang |  | 10 unit | 1.713.500 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 20 | Pengembangan produk IKM | Jumlah produk yang dikembangkan | 16 produk | 50.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM sektor mami, fashion, dan kriya |  | 16 produk | 230.000.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 7 | Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri | Jumlah SDM industri yang tersertifikasi | 25 orang | 150.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Pemilik dan Tenaga Kerja IKM olahan kripik kota malang |  | 25 org | 253.609.500 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 12 | Pengembangan/ revitalisasi sentra IKM | Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi | 1 IKM | 250.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Sentra IKM Kota Malang |  | 1 ikm | 287.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 16 | Pengembangan sistem informasi data industri | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 sistem | 120.000.000 | Block Grant | Kota Malang | IKM Kota Malang |  | 1 sistem | 181.125.000 |
|  |  |  |  | 2 | 7 | 28 | 18 | Penumbuhan wirausahan baru industri | Jumlah WUB industri | 80 | 150.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Masyarakat dari wilayah keurahan pengusul kegiatan memalui musrenbang |  | 80 | 201.250.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Perdagangan** |  |  | **20.507.664.000** |  |  |  |  |  | **29.009.051.435** |
| **Meningkatnya pemberantasan barang kena cukai ilegal** | **Persentase penurunan pelanggaran barang kena cukai ilegal** | **Jumlah pelangaran tahun sekarang dikurangi jumlah pelanggaran tahun lalu dibagi jumlah pelanggaran tahun lalu dikali 100%** | **0,5%** |  |  |  |  | **Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal** | **Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal** | **100%** | **100.000.000** |  |  |  |  |  | **115.000.000** |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 26 | 1 | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 8 kali | 100.000.000 | DBHCHT | Kota Malang | Pedagang Rokok di Kota Malang |  | 8 kali | 115.000.000 |
| **Meningkatnya kualitas pasar** | **Persentase pasar halal** | **Jumlah pasar yang halal dibagi jumlah pasar yang dikelola pemkot dikali 100%** | **11,54%** |  |  |  |  | **Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar** | **Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal** | 12% | **18.760.163.400** |  |  |  |  |  | **26.757.969.186** |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 6 | Revitalisasi Pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 5 pasar | 8.654.915.020 | Block Grant | Kota Malang | Pengguna Pasar Burung, Pasar kedungkandang, pasar madyopuro, dan pasar tawangmangu |  | 5 pasar | 14.343.513.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 4 | Rehabilitasi ringan/sedang/ berat gedung bangunan pasar rakyat | Jumlah pasar yang terpelihara | 9 pasar | 1.742.909.180 | Block Grant | Kota Malang | Pengguna pasar besar, pasar sukun, pasar baru barat, pasr kasi, pasar kebalen, pasar klojen, pasar OOD, pasar gadng lama, dan pasar lesan puro |  | 9 pasar | 2.006.185.556 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 5 | Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 427 org | 973.480.000 | Block Grant | Kota Malang | Pasar burung, pasar mergan, pasar madyopuro, dan pasar tawangmangu |  | 427 org | 1.234.810.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 9 | Pengadaan dan pemeliharaan Sarana pasar | Jumlah pengadaan gerobak sampah | 80 unit | 423.980.000 | Block Grant | Hotel di Kota Malang | Pedagang dan pengunjung pasar rakyat |  | 80 unit | - |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 8 | Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai standar nasional Indonesia | Jumlah peserta pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI | 130 org | 131.430.000 | Block Grant | Kota Malang | Pengelola pasar dan pedagang pasar rakyat |  | 130 org | 131.430.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 2 | Pengawasan dan pengendalian PKL | Jumlah papan himbauan PKL | 23 unit | 73.398.000 | Block Grant | Hotel di Kota Malang | Pedagang kaki lima di Kota Malang |  | 23 unit | 85.100.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 1 | Penataan dan penyuluhan PKL | Jumlah PKL yang menerima penyuluhan | 110 PKL | 67.750.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Pedagang kaki lima se Kota Malang |  | 110 org | 81.650.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 27 | 10 | Operasional UPT. Pasar | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 7 jenis | 6.692.301.200 | Block Grant | Kota Malang | Pasar rakyat yang berada di UPT.pasar |  | 7 jenis | 8.875.280.630 |
| **Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen serta stabilitas harga pokok dan bahan penting lainnya** | **Koefisien variasi harga baan pokok antar waktu** | **Simpang standar dibagi harga rata - rata dikali 100%** | **2%** |  |  |  |  | **Program Bina Perdagangan** | **Persentase peningkatan UTTP bertanda tera sah** | **100%** | **1.647.500.600** |  |  |  |  |  | **2.136.082.249** |
| **Pertumbuhan UKM subsektor ekonomi kreatif** | **Persentase peningkatan UKM subsektor ekonomi kreatif do Kota Malang** | **Jumlah UKM subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang tahun (n) dikurangi jumlah UKM subsektor ekonomi kreatif Kota Malang tahun (n-1) dibagi jumlah UKM sub sektor ekonomi kreatif tahun (n-1) di Kota Malang dikali 100%** | **15%** |  |  |  |  |  | **Persentase pertumbuhan UKM** | **1%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 2 | Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media cetak, televise dan radio | 90 kali | 143.780.000 | Block Grant | Kota Malang | Masyarakat di Kota Malang |  | 90 kali | 166.175.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 3 | Operasi pasar dan pasar murah | Jumlah komoditi yang menerima bantuan angkut | 1 kali | 69.305.200 | Block Grant | Kota Malang | Masyarakat menengah kebawah di kota malang |  | 1 kali | 80.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 4 | Pemantauan ketersediaan atau distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 1 kali | 27.970.000 | Block Grant | Kota Malang | Distributor di Kota Malang |  | 1 kali | 34.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 5 | Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 hari | 69.050.000 | Block Grant | Kota Malang | UKM di Kota Malang |  | 365 hari | 80.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 13 | Operasional UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 17 jenis | 385.395.400 | Block Grant | UPT. Metrologi | Pelaku yang memiliki UTTP |  | 17 jenis | 460.000.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 14 | Pelayanan tera dan tera ulang | Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang | 13,40 | 4.125.000 | Block Grant | Kota Malang | Pelaku usaha perdagngan di Kota Malang |  | 13.400 UTTP | 34.500.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 15 | Penyuluhan kemetrologian | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | 250 peserta | 26.045.000 | Block Grant | Hotel di Kota Malang | Pemilik maupun distributor SPBUdan SPBE serta pengusaha yang memiliki UTTP di Kota Malang |  | 250 peserta | 46.000.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 5 | Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 80 UKM | 45.570.000 | Block Grant | Hotel di Kota Malang | UKM di Kota Malang |  | 80 ukm | 55.280.500 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 6 | Promosi perdagangan produk Kota Malang | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 10 UKM | 452.070.000 | Block Grant | Indonesia | UKM binaan perdagangan |  | 10 ukm | 672.145.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 7 | Sosialisasi legalitas usaha perdagangan | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 60 UKM | 45.345.000 | Block Grant | Hotel di Kota Malang | Pelaku usaha perdagangan di Kota Malang |  | 60 ukm | 54.009.750 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 8 | Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan Gudang | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan gudang | 5 | 39.605.000 | Block Grant | Kota Malang | Para pelaku usaha pemilik gudang |  | 5 | 47.661.750 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 9 | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha/distribusi perdagangan | 5 | 29.560.000 | Block Grant | Toko modern di Kota Malang | Pelaku usaha perdagangan di Kota Malang |  | 5 | 36.167.500 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 10 | Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | Jumlah pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol | 5 | 39.560.000 | Block Grant | Kota Malang | Pelaku minuman beralkohol di Kota Malang |  | 5 | 47.667.500 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 11 | Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 50 UKM | 37.815.000 | Block Grant | Hotel di Kota Malang | Pelaku usaha perdagangan di Kota Malang |  | 5 | 45.637.749 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 12 | E-commerce bagi UKM Kota Malang | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 200 UKM | 30.505.000 | Block Grant | Dikopindag | UKM binaan perdagangan |  | 200 ikm | 35.650.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 18 | Pengembangan dan pemutakhiran data UKM | Jumlah dokumen data UKM | 500 UKM | 55.800.000 | 0 | Kota Malang | Pelaku usaha perdagangan di Kota Malang |  | 55 ukm | 64.687.500 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 | 1 | Sosialisasi konsumen cerdas | Jumlah peserta konsumen cerdas | 125 org | 100.000.000 | Block Grant | Salah satu hotel di Kota Malang | Masyarakat di Kota Malang |  | 250 org | 115.000.000 |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 25 |  | Pos ukur ulang barang non BDKT | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali | 46.000.000 | Block Grant | Kota Malang | Pelaku usaha perdagangan di Kota Malang |  | 25 kali | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Urusan Umum** |  |  | **6.275.749.000** |  |  |  |  |  | **54.288.890.062** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Umum** |  |  | **6.275.749.000** |  |  |  |  |  | **54.288.890.062** |
| **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** | **Nilai SAKIP** | **Nilai SAKIP** | **80,9** |  |  |  |  | **Program Pelayanan Kesekretariatan** | **Persentase dokumen perencanaana, keuangan dan pelaporan yang di susun tepat waktu** | **100%** | **6.275.749.000** |  |  |  |  |  | **54.288.890.062** |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 1 dokumen | 175.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 1 dokumen | 115.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen | 1.500.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 6 dokumen | 11.500.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 4 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen | 99.480.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 2 dokumen | 45.255.156.656 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 7 | Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasaan Masyarakat | 2 dokumen | 500.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 2 dokumen | 6.060.500 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 9 | Penyusunan/ Review Standar Pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2 dokumen | 31.930.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 2 dokumen | 40.250.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 10 | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen | 1.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 4 dokumen | 11.500.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 12 | Penyusunan/ Review Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen | 500.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 1 dokumen | 6.325.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 13 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen Renja/RKT | 1 dokumen | 71.150.000 | Block Grant | Salah satu hotel di Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 2 dokumen | 86.250.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 15 | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 dokumen | 213.760.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 1 dokumen | 34.500.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luas bangunan yang akan dipelihara | 250 m2 | 110.845.590 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 250 m2 | 604.722.428 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 80 kendaraan | 472.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 80 kendaraan | 744.050.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis | 50.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 6 jenis | 57.500.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 31 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang teradministrasi dengan baik | 4.101 surat | 877.500.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 4.101 surat | 1.009.125.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 32 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran telepon, air, dan listrik | 12 bulan | 457.205.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 12 bulan | 238.285.748 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 37 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2.755 m2 | 180.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 2.755 m2 | 207.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 38 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | 87 jenis ATK | 260.978.023 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 87 jenis ATK | 300.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 39 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis | 687.884.807 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 15 jenis | 566.950.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 40 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 20.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 8 jenis | 23.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 42 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 jenis | 20.000.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 3 jenis | 23.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 43 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | 7849 kotak | 331.525.000 | Block Grant | Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 7849 kotak | 241.500.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 44 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 80 kali | 770.710.580 | Block Grant | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 80 kali | 3.028.214.730 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 50 | Peringatan/ Kegiatan Insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil | 1 kali | 60000000 | Block Grant | Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 1 kali | 69.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 61 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 jenis | 100.000.000 | Block Grant | Dikopindag | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 4 jenis | 115.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 66 | Pengadaan BBM dan Pelumas | Jumlah /volume BBM dan pelumas | 83.479 liter | 950.000.000 | Block Grant | jl.trunojoyo no.1 Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 83.479 liter | 1.092.500.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 72 | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 82 org | 300.000.000 | Block Grant | Seluruh Indonesia, Kota Malang | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 82 org | 345.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 7 | 5 | Penyusunan Bahan Anjab / ABK | Jumlah Bahan Anjab / ABK PD | 1 dokumen | 32.280.000 | Block Grant | Dikopindag | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang |  | 1 dokumen | 57.500.000 |

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2019

| **Struktur Organisasi** | **RENSTRA / RENJA PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Program/Kegiatan** | | | | | **Urusan** | **Bidang Urusan** | **Program/Kegiatan** | **Indikator** | **Target 2021** | **Satuan** | **Sub Kegiatan** | **Indikator Sub Kegiatan** | **Kegiatan** | **Indikator Kegiatan** | **Program** | **Indikator Program** | **Bidang Urusan** | **Urusan** | **Kode** | | | | |
| **1** | **2** | | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | | | | |
| Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan |  |  |  |  |  | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Bidang Koperasi | **Program Pembinaan Koperasi** | Persentase Koperasi Aktif | 87,10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran Koperasi | Jumlah Unit Koperasi yang difasilitasi pembentukan, perubahan dan pembubarannya | 17 kop |  | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pembubarannya | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundanng-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek | 75 org |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT setelah Bimtek | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian | 70 org |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Perkoperasian | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi / masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | 408 org |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Pengurus Koperasi / masyarakat yang difasilitasi dalam rangka peringatan hari koperasi | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi | Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | 31 sertifikat |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi KSP/USP yang mendapatkan sertifikat | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi pembentukan koperasi sariah | Jumlah Koperasi yang menerapkan Koperasi Syariah | 58 kop |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Koperasi yang memperoleh informasi tentang prinsip ekonomi syariah | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bimtek Manajemen Koperasi | Jumlah koperai yang difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dan SAKETAP | 46 kop |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Koperasi yang berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Peningkatan Akses Permodalan | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | 35 kop |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Permasalahan Permodalan | Jumlah Fasilitasi Permasalahan permodalan | 45 kasus |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Fasilitasi Permasalahan permodalan | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Klinik Koperasi | Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi | 380 org |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang melakukan konsultasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi | 46 kop |  | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundanng-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP | Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes | 353 kop |  | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan pemberian Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi yang patuh | 117 kop |  | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang patuh | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundanng-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi | Jumlah unit Koperasi yang diperiksa | 78 kop |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah unit Koperasi yang diperiksa | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis manajemen pengawas koperasi | Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek | 78 kop |  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Monitoring dan evaluasi pengawasan | Jumlah Unit Koperasi dimonitoring | 20 kop |  | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Koperasi dimonitoring | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundanng-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | Jumlah Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | 75 kop |  | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundanng-Undangan yang berlaku. | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bimbingan Usaha Koperasi dan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Koperasi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan | 81 kop |  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Bidang Usaha Mikro | **Program Pengembangan Usaha Mikro** | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | 70,39% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kota Malang | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | 35 UM |  | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi perlindungan usaha bagi produk usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindunganusaha | 39 surat ijin, 23 sertifikat, 8 hak merek |  | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindunganusaha | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindunganusaha | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Klinik Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi denganpendampingan klinik | 3.888 org |  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi denganpendampingan klinik | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi denganpendampingan klinik | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan dan pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | 73 UM |  | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang menerapkan pemasaran secara online dan offline | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis | 4 MOU |  | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah kerjasama atau MOU dari kegiatan temu bisnis | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro binaan yang naik menjadi usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | 78 UM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Database Usaha Mikro | Jumlah database usaha mikro | 1 aplikasi |  | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 1 Aplikasi Database Usaha Mikro | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Penyusunan 1 Aplikasi Database Usaha Mikro | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Terselesaikannya 1 Aplikasi Database Usulan Mikro | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | 78 UM |  | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi peningkatan mutu, desain produk usaha dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan | Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan | 156 UM |  | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 55 Usaha Mikro yang mengikuti Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 55 Usaha Mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan. | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pelaksanaan Fasilitasi 55 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pendampingan pemberdayaan UM | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | 38 UM |  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | 340 UM |  | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 340 Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Pemasaran bagi Usaha Mikro bidang Kuliner, Home Decoration dan Muslim Fashion | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Pelaksanaan Fasilitasi 340 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program pembinaan lingkungan sosial dibidang Usaha Mikro** | Prosentase pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh | 48,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | 450 org |  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 450 tenaga kerja dan masyarakat kota Malang yang mengikuti Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase pertumbuhan WUB mikro yang tumbuh | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (usaha mikro) | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | 88 org |  | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (usaha mikro) | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 88 usaha mikro yang mengikuti Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (usaha mikro) | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang dan menuju usaha kecil | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Perindustrian | Bidang Perindustrian | **Program Pengembangan Industri** | Persentase peningkatan jumlah IKM | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Perindustrian | Bidang Perindustrian | **Program Pengembangan Industri** | Persentase peningkatan jumlah IKM | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pencitraan Produk Industri Kreatif | Jumlah jenis produk yang di branding | 2 jenis |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan Kemitraan bagi Industri | Jumlah perjanjian kerjasama | 3 perjanjian kerjasama |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan event Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti event kreatif | 800 pelaku industri kreatif/tahun |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Workshop Teknis Industri Kreatif | Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti workshop | 600 IKM kreatif |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Forum stakeholder industri | Jumlah dokumen perumusanrancangan arah kebijakan pengembangan industri Kota Malang | 50 orang |  | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Operasional dan aktifasi MCC | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan MCC | 2.000 pelaku kreatif |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri | Jumlah SDM industri yang tersetifikasi | 50 orang |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan desain dan teknologi | Jumlah produk industri yang mendapatkan fasilitasi peningkatan desain dan teknologi | 100 produk |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan dan pendampingan industri hijau | Jumlah IKM yang memahami dan menerapkan sistem industri hijau | 5 IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan penerapan standar mutu produk IKM | Jumlah ikm yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu | 50 IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemetaan penyedia bahan baku | Jumlah dokumen data penyedia bahan baku industri | 1 dokumen |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan/ Revitalisasi Sentra IKM | Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi | 1 sentra IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inkubator industri | Jumlah IKM yang mengikuti inkubasi | 20 IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penguatan Kelembagaan IKM | Jumlah kelembagaan IKM yang mendapatkan legalitas | 4 lembaga IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi standarisasi industri dan KI | Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi | 20 IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan Sistem Informasi Data Industri | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 1 sistem informasi data yang dimutakhirkan |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | jumlah data yang dimutakhirkan | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase peningkatan data industri | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyuluhan bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan penyuluhan | 150 IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penumbuhan wirusaha baru industri | Jumlah wub | 10 wub industri |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemantauan dan Pengawasan IKM | Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi | 100 IKM |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan | Jumlah industri yang menjadi sasaran pengawasan dan pengendalian kepatuhan usaha industri dan Kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan perizinan Kawasan industri | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | Jumlah IUI yang diterbitkan | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase peningkatan ijin usaha industri yang diterbitkan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan produk IKM | Jumlah produk yang dikembangkan | 5 produk |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program Pembinaan Industri (Cukai)** | Persentase IHT yang dibina | 0,3 |  |  |  |  |  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pendataan Dan Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok | Jumlah mesin pelinting yang di awasi | 40 Mes in Pelin ting Ro kok |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | (Jumlah mesin pelinting yang di awasi) | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | (Jumlah mesin pelinting yang di awasi) | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemetaan Industri Hasil tembakau | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | 1 dok |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase program/kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program Bina Perdagangan** | Persentase Peningkatan UTTP Bertanda Terra Sah | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Operasional UPT. Metrologi | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | 23 jenis |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Metrologi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 06 | 2 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelayanan tera dan tera ulang | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | 13.400 UTTP |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah alat UTTP yang diter/tera ulang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 06 | 2 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyuluhan kemetrologian | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | 150 peserta |  | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 06 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pos ukur ulang barang non BDKT | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | 22 kali |  | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 06 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi konsumen cerdas | Jumlah peserta sosialisasi konsumen cerdas | 250 peserta |  | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah peserta yang diberikan penyuluhan | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP yang ditera/Tera ulang | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 06 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media | 90 kali di media cetak, 65 kali di televisi (*running text*) dan 1 kali di radio |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah harga bahan pokok yang dipantau | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah penayangan di media cetak | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Prosentase jumlah penayangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 04 | 2.02 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Operasi pasar dan pasar murah | Jumlah pengadaan pasar murah | 1 kali |  | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah harga bahan pokok yang dijual berdasarkan HET | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase bahan pokok yang mengalami kenaikan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 04 | 2.02 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online |  |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |  | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |  | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 04 | 2.02 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemutakhiran data sistem informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting lainnya | Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online | 365 Hari |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah aplikasi yang mefasilitasi harga sembako di pasar (setiap hari) | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi yang mefasilitasi harga sembako di pasar (setiap hari) | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase harga bahan pokok yang mengalami kenaikan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 04 | 2.02 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | Jumlah pemantauan ketersediaan/ distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya | 2 Kali |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah distributor yang dipantau | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah distributor yang dipantau | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase distributor yang dipantau | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 04 | 2.02 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | 110 UKM |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah UKM yang bermitra dengan toko modern | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | Peningkatan jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 02 | 2.03 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Promosi perdagangan produk Kota Malang | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | 20 UKM |  | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota, Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri di tingkat Kabupaten/ kota | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Peningkatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Prosentase penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 07 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi legalitas usaha perdagangan | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | 19 UKM |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah UKM yang mengurus legalitas usaha setelah sosialisasi | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | Peningkatan jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 02 | 2.03 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan dan pemutakhiran data UKM | Jumlah UKM yang di data | 600 data |  | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah UKM yang di data | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Peningkatan pendataan UKM dan penggunaan produk dalam Negeri | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Prosentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 07 | 2.01 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan gudang | Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan |  | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Peningkatan penerbitan Tanda Daftar Gudang | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 02 | 2 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sarana usaha/ distribusi perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | 50 toko modern dan 1 kali pembinaan |  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah toko modern yang memiliki legalitas usaha dan pembinaan terhadap pengusaha toko modern | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase peningkatan pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2.02 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan minuman beralkohol | Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | 1 kali pembinaan dan 4 kali penga-wasan |  | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | Peningkatan pembinaan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Prosentase peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 02 | 2.05 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bimbingan teknis ekspor bagi UKM Kota Malang | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | 80 UKM |  | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, Pembinaan pelaku usaha ekspor | Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan pembinaan dan penyelanggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Prosentase peningkatan pengembangan ekspor | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E-Commerce bagi UKM Kota Malang | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | 125 UKM |  | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, Peningkatan citra produk ekspor | Jumlah UKM yang telah melakukan e-commerce | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan pembinaan dan penyelanggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Prosentase peningkatan pengembangan ekspor | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 05 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar** | Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal | 0,1154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rehabilitasi ringan/sedang/ berat gedung dan bangunan pasar rakyat | Jumlah pasar yang terpelihara | 4 pasar |  | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang terpelihara | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar dan sarana distribusi perdagangan yang sudah direhabilitasi dan peningkatan fasilitasi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penampungan pedagang untuk revitalisasi pasar | Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi | 150 pedagang |  | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang di tampung saat revitalisasi | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pedagang yang ditampung pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase jumlah pedagang yang ditampung pada pembangunan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Revitalisasi pasar | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 2 pasar |  | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang di revitalisasi | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang direvitalisasi pada pembangunan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase pasar yang direvitalisasi pada pembangunan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan dan pemeliharaan sarana pasar | Jumlah pengadaan dan perbaikan sarana pasar | 20 unit |  | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pengadaan dan perbaikkan sarana psar | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah peningkatan sarana fasilitasi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase peningkatan sarana fasilitasi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan ketertiban pasar rakyat | 100 peserta |  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah peserta Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2.02 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Extensifikasi dan Intensifikasi retribusi pasar | Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah | 44 kali |  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pelaksanaan monitoring Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan pelaksanaan monitoring Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Prosentase Peningkatan pelaksanaan monitoring Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2.02 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pendataan pedagang pasar rakyat | Jumlah pedagang yang akan di data | 250 pedagang |  | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Peningkatan pendataan pedagang dalam pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan prosentase pendataan jumlah pedagang Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan prosentase pendataan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2.02 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pasar dengan pihak ketiga | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi | 2 kali |  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendaliaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Peningkatan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan prosentase sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2.02 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Operasional UPT. Pasar | Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan operasional UPT. Pasar | 11 jenis |  | Penyediaan sarana distribusi perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Peningkatan penyediaan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan prosentase penyediaan sarana distribusi perdagangan | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  | 03 | 2 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program Pemberantasan barang kena cukai illegal (cukai)** | Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran | Jumlah pembinaan dan pengawasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai | 1 kali pembinaan dan 8 kali pengawasan |  | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat Kab/Kota | Jumlah pengawasan barang yang kena cukai ilegal | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah UKM yang mengikuti pameran | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase peningkatan UKM yang difasilitasi untuk mengikuti pameran | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Program Pelayanan Kesekretariatan** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 4101 surat |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 bulan |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 2755 m2 |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 87 jenis ATK |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penagandaan | 15 jenis |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 jenis surat kabar |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 7849 kotak |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 80 kali |  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peringatan/ kegiatan insidentil | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil | 1 kali |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 jenis |  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/ volume BBM dan pelumas | 83479 liter |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/volume BBM dan pelumas | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah umberdaya aparatur yang mengikuti pelatihan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dll | 82 orang |  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Nilai survey kepuasan internal |  |  | X | XX | 01 | 2.04 | 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 250 m2 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 80 unit |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 6 jenis |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | **Administrasi Umum** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik |  |  | X | XX | 01 | 2.03 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | 1 dokumen |  | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah | **Administrasi Keuangan** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.02 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 6 dokumen |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | **Administrasi Keuangan** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.02 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | 2 dokumen |  | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | **Administrasi Keuangan** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.02 | 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan bahan anjab/ABK | Jumlah bahan anjab/ABK PD | 1 dokumen |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah bahan anjab/abk skpd | **Administrasi Keuangan** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.02 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen hasil survei kepuasaan masyarakat | 2 dokumen |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan/ reviu standar pelayanan | Jumlah dokumen standar pelayanan | 2 dokumen |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen standar pelayanan | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.01 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | 4 dokumen |  | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.01 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan/ reviu Renstra | Jumlah dokumen Renstra | 1 dokumen |  | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah dokumen renja/RKT | 1 dokumen |  | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renja/RKT | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan profil perangkat daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | 1 dokumen |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen profil perangkat daerah | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  | X | XX | 01 | 2.01 | 03 |

BAB V

PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai ujung tombak urusan koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ini adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Renja, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsi dinas akan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya, sekaligus dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci, terarah, efektif, efisien, terpadu, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang untuk periode satu tahun ke depan.

Adapun Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perkoperasian, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan baik ditingkat Internasional, regional, nasional, Provinsi Jawa Timur hingga kota. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh kementrian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Forum musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2021 juga menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Renja dan Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2021 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaiakan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang membutuhkan serta sebagai evaluasi dan motivasi bagi organisasi perangkat daerah adapun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, berupa :

1. Catatan Penting Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektiftivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui Musrenbang Kota, Musrenbang Kecamatan dan melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), agar program dan kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.
2. Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan. Terwujudnya Renja PD merupakan prasyarat bagi setiap PD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018-2023 sesuai dengan RPJMD Kota Malang Periode 2019-2023. Kaidah-kaidah pelaksanaan:
3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya;
4. Kepala Dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris dan Kepala Bidang berkewajiban melaksanakan program berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2021;
6. Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi membantu secara teknis Sekretaris dan Kepala Bidang dalam pencapaian target kinerja dari setiap kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2021;
7. Staf membantu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan kegiatan masing-masing; dan
8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat melakukan revisi/perubahan terhadap program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi terkini dengan melakukan Perubahan Renja PD Tahun 2021 yang disusun secara paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2021.
9. Rencana Tindak Lanjut
10. Koordinasi dan Konsultasi yang lebih intensif dengan stakeholder untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran PD;
11. Peningatan Sumberdaya Aparatur melalui Diklat formal, bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja aparatur;
12. Mereview pencapaian target kinerja sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya;
13. Pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terstruktur dalam mendukung pencapaian target kinerja; dan
14. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI